

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan

Kependudukan adalah isu strategis yang bersifat lintas sektoral dan Informasi perkembangan Kependudukan merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan data perkembangan kependudukan yang valid dan mutakhir. Data kependudukan ini diperoleh dari data registrasi penduduk dan non registrasi. Data registrasi merupakan data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, sedangkan data non registrasi yaitu data yang didapat dari lintas sektoral. Ketersediaan data perkembangan kependudukan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Untuk itu pengembangan Sistem Informasi Kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Sebagai modal dasar, pelaku pembangunan sekaligus menjadi faktor dominan yang menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri, maka penduduk harus menjadi perhatian dari seluruh upaya pembangunan dan perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh penduduk bukan oleh sebagian atau segolongan tertentu saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah di konsolidasikan dan di bersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri dan pada Pasal 83 ayat (1) ditegaskan juga bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan dimaksud perlu dilakukan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Panjang setiap tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Sumber data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan tersebut berasal dari data registrasi yaitu data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta data yang bersumber dari lintas sektor terkait lainnya yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi perkembangan kependudukan di Kota Padang Panjang dan prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang serta merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi dan bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan pemerintah daerah maupun dalam menyusun perencanaan pembangunan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan profil perkembangan kependudukan ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi perkembangan dan prospek kependudukan di Kota Padang Panjang, sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta perencanaan pembangunan disemua sektor.

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan masalah kependudukan, maka ruang lingkup penyusunan profil perkembangan kependudukan di Kota Padang Panjang ini meliputi perkembangan kependudukan tahun 2018 dengan cakupan data antara lain :

1. Kuantitas penduduk, memuat jumlah-jumlah persebaran penduduk dan penduduk menurut karakteristik demografi.
2. Kualitas penduduk memuat kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
3. Mobilitas penduduk memuat Migrasi Masuk, Migrasi Keluar, dan Migrasi Neto
4. Kepemilikan dokumen kependudukan memuat kepemilikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta dan surat keterangan orang terlantar.

D. Pengertian Umum Terhadap Istilah Yang Digunakan Dalam Profil Perkembangan Kependudukan.

Dalam rangka memberikan kesamaan persepsi tentang beberapa istilah yang digunakan maka beberapa pengertian umum yang ada dalam penyusunan profil kependudukan ini adalah sebagai berikut :

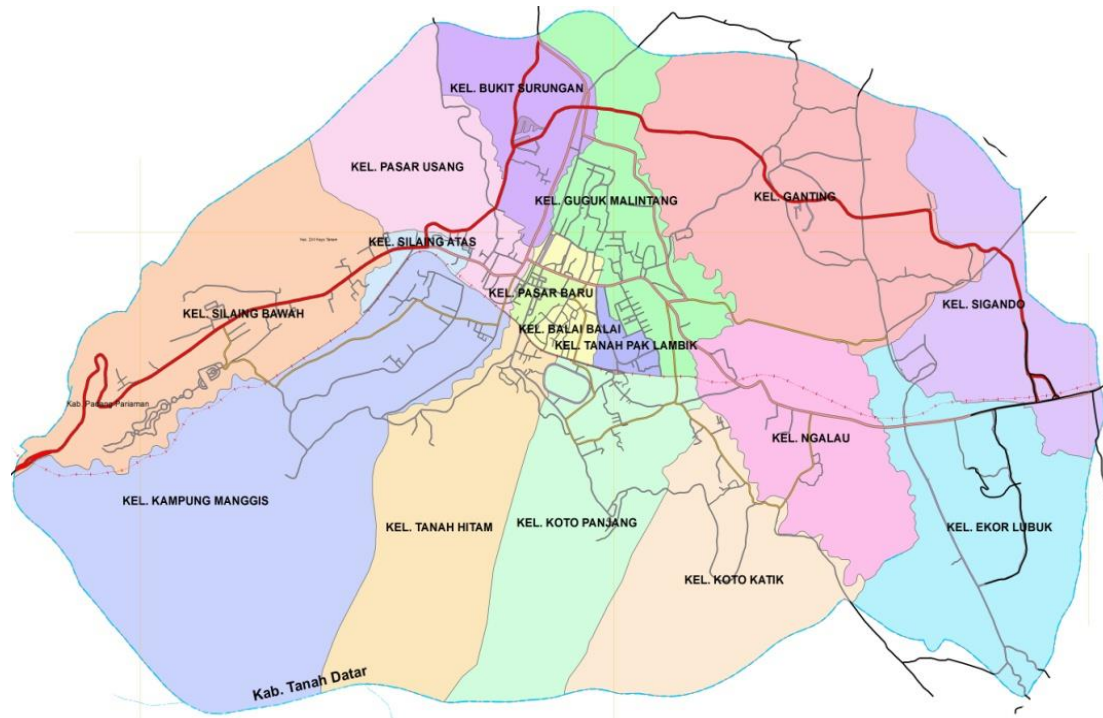
1. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan; **(UU No 10 Tahun 1992)**
2. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; **(UU No. 23 Tahun 2006)**
3. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap; **(UU No. 23 Tahun 2006)**
4. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. **(UU No. 23 Tahun 2006)**
5. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan; **(Penjelasan UU No. 23 Tahun 2006)**
6. **Lahir hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot; **(Penjelasan UU No. 23 Tahun 2006).**
7. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap dikawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah; **(UU Nomor 29 Tahun 2009)**

8. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak; **(UU No. 52 Tahun 2009)**
9. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan; **(UU No. 52 Tahun 2009)**
10. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia; **(UU No. 23 Tahun 2006)**
11. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat; **(Permendagri No. 65 Tahun 2010)**
12. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan; **(Permendagri No. 65 Tahun 2010)**
13. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; **(Permendagri No. 65 Tahun 2010)**
14. **Profil Perkembangan Penduduk** adalah gambaran kondisi perkembangan dan prospek kependudukan; **(Permendagri No. 65 Tahun 2010)**
15. **Ratio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu; **(Lampiran Permendagri No. 65 Tahun 2010)**
16. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal;
17. **Migrasi penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain; **(Lampiran Permendagri No. 65 Tahun 2010)**
18. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
19. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun; **(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)**
20. **Pengangguran** adalah Orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja;
21. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap **angkatan kerja**;
22. **Angkatan Kerja** adalah Penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (manggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif; **(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)**
23. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
24. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15-49 tahun) ; **(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)**

25. **Kematian atau mortalitas** adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi; **(Penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2006)**
26. **Angka Kematian neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)** adalah banyaknya kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu ; **(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)**
27. **Angka Kematian Post Neo–natal (Bayi Lepas Baru Lahir PNNDR)** adalah Banyaknya kematian bayi berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama1 tahun;
(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)
28. **Angka Kematian Bayi/IMR** adalah jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu; **(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)**
29. **Angka Kematian Ibu/MMR** adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 10.000 kelahiran hidup; **(Lampiran Permedagri No 65 tahun 2010).**
30. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
31. **Penduduk Melek Huruf** adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas yangdapat membaca dan menulis huruf ; **(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)**
32. **Buta Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang belum bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengataman dasar;
33. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitandengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama ; **(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)**
34. **Angka Partisipasi Kasar /APK** adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu; **(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)**
35. **Rasio kepadatan penduduk (*density ratio*)** yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu; **(Lampiran Permendagri No 65 Tahun 2010)**
36. **Keluarga** merupakan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya.

BAB. II GAMBARAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

A. Letak Geografis Daerah



Gambar 1 : Peta Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang terletak pada dataran tinggi (Daerah Pegunungan) dengan ketinggian antara 550-900 m di atas permukaan laut, dengan posisinya yang diapit oleh tiga gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat, sehingga udaranya sejuk. Sedangkan suhu udara rata-rata adalah $22,3^{\circ}\text{C}$ dengan kelembaban udara $86,92^{\circ}\text{C}$.

Luas wilayah Kota Padang Panjang adalah 2.300 Ha atau sekitar 0.05% dari luas Propinsi Sumatera Barat. Secara geografis Padang Panjang terletak antara $100^{\circ} 20'$ dan $100^{\circ} 30'$ Bujur Timur serta $0^{\circ} 27'$ dan $0^{\circ} 32'$ Lintang Selatan. Secara detail batas-batas Kota Padang Panjang adalah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto

B. Kondisi Demografi Daerah

Secara administratif Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur, sedangkan luas masing-masing kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang Panjang sebagai berikut :

Tabel 1

Tabel Jumlah Luas Kota Padang Panjang menurut Kecamatan/ Kelurahan Kota Padang Panjang Tahun 2019

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
I. Padang Panjang Barat	1. Silaing Bawah	261
	2. Silaing Atas	54
	3. Pasar Usang	59
	4. Kampung Manggis	316
	5. Tanah Hitam	72
	6. Pasar Baru	23
	7. Bukit Surungan	121
	8. Balai-Balai	69
Jumlah Luas Wilayah Padang Panjang Barat		975
II. Padang Panjang Timur	1. Guguk Malintang	190
	2. Tanah Pak Lambik	26
	3. Koto Panjang	133
	4. Koto Katik	101
	5. Ngalau	145
	6. Ekor Lubuk	280
	7. Ganting	310
	8. Sigando	140
Jumlah Luas Wilayah Padang Panjang Timur		1.325
Total		2.300

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel 1 terlihat bahwa wilayah terluas terletak pada kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas wilayah 1.325 Ha, sedangkan Kecamatan Padang Panjang Barat hanya memiliki luas wilayah 975 Ha. Adapun kelurahan yang memiliki wilayah terluas yakni kelurahan Kampung Manggis (316 Ha) sedangkan kelurahan yang memiliki luas terkecil yakni kelurahan Pasar Baru (23 Ha).

Kota Padang Panjang sebagai daerah pegunungan dengan lahan yang relatif sempit memiliki kawasan terbangun yang cukup besar. Namun demikian masih terdapat kawasan pertanian yang terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura. Sehingga untuk penggunaan lahan yang ada cukup beragam dan bercampur antara daerah terbangun yang digunakan untuk berbagai kegiatan perumahan/pemukiman dan daerah tidak terbangun seperti lahan pertanian.

C. Gambaran Ekonomi Daerah

Sampai dengan tahun 2019 struktur perekonomian kota Padang Panjang menurut lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Kendaraan kemudian diikuti oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Industri Pengolahan seperti Industri Kecil-Menengah Pengolahan Kulit, Industri Rumah Tangga produk makanan dsb.

- Kota Padang Panjang mempunyai 2 buah pasar yaitu Pasar Kota Padang Panjang dan Pasar Hasil Pertanian yang terletak bersebelahan dengan Terminal Bukit Surungan
- Sektor peternakan mempunyai produk unggulan sapi perah (penghasil susu murni)
- Sektor Pertanian dapat dilihat dalam Pengembangan Sayur Organik
- Pengembangan Tanaman Hias (*Raphis exelsa* yang sudah di ekspor sampai ke luar negeri)
- Pengembangan budi daya perikanan (ikan dataran tinggi)
- Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah bersertifikat halal yang dikeluarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) sehingga daging yang dipasarkan telah memenuhi standar untuk dikonsumsi
- Padang Panjang terkenal dengan beragam macam kuliner yang memiliki cita rasa khas dan memiliki daya tarik tersendiri
- Sektor pertanian dalam jangka panjang akan menurun karena semakin banyaknya lahan yang digunakan untuk pemukiman dan pertokoan
- Sektor Pariwisata, Kota Padang Panjang memiliki wahana rekreasi yang juga sangat berdampak baik bagi lapangan usaha masyarakatnya yaitu Mifan Water Park disertai dengan adanya PDIKM (Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau) yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara
- Perkembangan pembangunan hotel dan penginapan yang semakin meningkat juga merupakan salah satu upaya pengembangan ekonomi dan peluang usaha bagi usahawan dan masyarakat di Kota Padang Panjang.

D. Potensi Daerah

1. Bidang Pendidikan



Pesantren Diniyah Putri



Pesantren Serambi Mekah



Thawalib Putra

Pendidikan merupakan salah satu agenda pembangunan yang ditetapkan sebagai misi utama tiap tahun Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang tentunya pendidikan yang lebih islami sejalan dengan karakteristik Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah.

Saat ini Kota Padang Panjang dijadikan sebagai pusat pendidikan yang dikenal dengan Kota Serambi Mekah yang didukung dengan sarana Pendidikan diantaranya adalah Pesantren Diniyah Putri yang telah berdiri sejak tahun 1923 dan didirikan oleh Ibunda Rahmah El Yunusiyah, pesantren yang telah melahirkan tokoh di tingkat nasional bahkan sampai ke mancanegara dengan program pendidikan mulai dari TK sampai ke Perguruan Tinggi, begitu juga dengan Perguruan Thawalib Putra, perguruan yang telah berdiri sejak tahun 1900 dibawah asuhan Syekh Abdullah Ahmad dengan berkembang pesatnya pendidikan ini sehingga pada tahun 1989 Thawalib menerima murid putri dengan lokasi terpisah, dan saat ini Perguruan Thawalib juga sudah menyediakan program pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai ke Perguruan Tinggi. Selain Pesantren Diniyah Putri dan Perguruan Thawalib Putra, terdapat juga Pesantren Serambi Mekah dan Pesantren Darul Hikmah serta berbagai lembaga pendidikan berkualitas lainnya dari tingkat SD hingga Perguruan tinggi, termasuk sekolah unggul SMA 1 Sumbar juga berada di Kota Padang Panjang.

Di Tingkat Perguruan Tinggi, terdapat Kauman Muhammadiyah yang cukup terkenal, Kauman ini di besarkan di Kota Padang Panjang dengan para kader dari alumni Tabligh School dari berbagai Pulau Jawa pada masa itu. Kauman Muhammadiyah ini telah berhasil melahirkan da'i yang mapan dan para siswa-siswanya yang dikenal mampu hidup bermasyarakat dengan baik berkat kehidupan kampus dari Kauman Muhammadiyah ini. Selain itu terdapat Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi Negeri bidang Seni yang ada di Sumatera dan juga sudah dikenal ke manca negara bahkan setiap tahun ada beberapa orang mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di Perguruan Tinggi tersebut.

Oleh karena itu, Padang Panjang telah dikenal sebagai Kota Pendidikan. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kota Padang Panjang saat ini telah sangat memadai dengan telah tersedianya berbagai lembaga pendidikan dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, bahkan tingkat pra-sekolah pun (PAUD dan TK) sudah cukup banyak di Kota Padang Panjang.

2. Bidang Kesehatan

Kota Padang Panjang dengan luas wilayah relatif kecil ini memiliki 2 rumah sakit yaitu 1 buah milik pemerintah daerah dan 1 buah milik swasta. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang yang merupakan rumah sakit milik pemerintah sedangkan rumah sakit swasta yakni Rumah Sakit Islam Ibnu Sina (YARSI) dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai.

Sementara itu dalam rangka mendukung misi utama pembangunan Kota Padang Panjang periode tahun 2018-2023 yaitu salah satunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, saat ini telah berdiri 2 perguruan tinggi bidang kesehatan yang dikelola oleh pihak swasta yaitu Akademi Keperawatan (Akper) Nabila dan Akademi Keperawatan Imam Bonjol.

3. Bidang Kepariwisataaan



Minangkabau Fantasy Island (Mifan)



Lubuk Mata Kucing



Desa Wisata Kubu Gadang

Bidang Kepariwisataaan dan kegiatan perekonomian tidak dapat dipisahkan, kedua kegiatan ini senantiasa saling mendukung. Kota Padang Panjang dengan berbagai potensi yang ada telah memosisikan Padang Panjang sebagai salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat. Guna mendukung kegiatan pariwisata tersebut di Kota Padang Panjang telah berdiri beberapa penginapan dan hotel antara lain Hotel Rangkayo Basa, Hotel Tripadov, Hotel Aulia, Hotel Pangeran dan penginapan-penginapan lainnya ditambah lagi dengan adanya Minangkabau Fantasy Island (MIFAN) yang berlokasi di Kawasan Perkampungan Minangkabau Kelurahan Silaing Bawah. Perkampungan Minangkabau ini menampilkan bentuk-bentuk bangunan asli perkampungan pada abad ke 19 dengan berbagai bentuk dan fungsinya yang terletak di sebelah kanan jalur lintas Padang-Bukittinggi Kelurahan Silaing Bawah. Pada Perkampungan Minangkabau ini juga terdapat PDIKM (Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau) yang merupakan salah satu museum di Sumatera Barat bersisikan berbagai macam informasi dan koleksi mengenai kebudayaan Minangkabau baik berupa dokumentasi audio (suara) maupun visual (dapat di lihat).

Lubuk Mata Kucing, merupakan salah satu objek wisata di Padang Panjang yang merupakan pemandian yang airnya bersih, segar bersumber dari mata air di kaki Gunung Singgalang. Lubuk Mata Kucing menawarkan pemandangan alam kaki Gunung Singgalang yang indah dengan perbukitan, sawah dan sungai Batang Anai yang membentang dari kejauhan. Lubuk Mata Kucing terdiri atas pemandian kolam untuk dewasa dan anak-anak, banyak dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar daerah, terutama pada hari-hari libur.

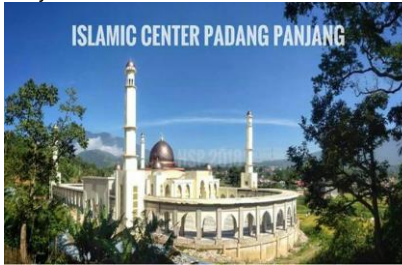
Kota Padang Panjang juga memiliki Desa wisata Kubu Gadang yang terkenal dengan “silek lanyah” atau atraksi silat di lumpur yang dilakukan di lahan sawah yang telah dipanen. Di samping atraksi budaya dan kondisi alam yang memang menarik jadi objek foto, warga di Kubu Gadang menambah daya tarik sebagai destinasi digital dengan membangun sejumlah spot foto dan menyediakan kuliner tradisional yang

sudah jarang ditemui.

4. Bidang Keagamaan



Masjid Asasi



Islamic Centre Padang Panjang

Kota Padang Panjang memiliki Masjid Asasi yang merupakan masjid tertua di Kota Padang Panjang yang terletak di Kelurahan Sigando Padang Panjang. Masjid ini diperkirakan berusia \pm 400 tahun, dibangun pertama kali oleh masyarakat suku 4 koto yang bahu membahu membangun tempat peribadatan bagi umat Islam. Awalnya, masjid ini berbentuk Surau, dan dinamakan Surau Gadang. Pada perkembangannya, dilakukan perbaikan hingga menjadi masjid seperti sekarang. Masjid ini berada \pm 500 m dari jalan utama Padang Panjang-Solok. Masjid dengan luas \pm 300 m² ini memiliki ciri khas arsitektur bangunan Minangkabau berupa bangunan berpanggung dengan ukiran-ukiran khas Minangkabau. Saat ini Masjid Asasi berada dibawah lindungan Kantor Wilayah Suaka Alam dan Peninggalan Sejarah Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang Panjang juga telah mewujudkan keinginan masyarakat untuk memiliki sebuah pusat ibadah dan kegiatan islami, dengan telah berhasil dibangunnya Islamic Center Kota Padang Panjang, yang mana keberadaan Islamic Center ini dapat menjadi pusat kegiatan, pendidikan, budaya serta ilmu sejarah peradaban Islam bahkan lebih jauh lagi dapat menjadi tempat “lahirnya” para tahfiz Alquran, pemuka-pemuka agama serta muballgh yang mahsyur nantinya, seperti sejarah yang pernah ada di Kota Padang Panjang.

BAB. III

KUANTITAS PENDUDUK KOTA PADANG PANJANG

Kuantitas penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu, kuantitas penduduk memuat Jumlah dan Persebaran Penduduk meliputi :

- A. Jumlah dan Persebaran Penduduk
 - 1. Jumlah dan proporsi penduduk menurut Jenis kelamin
 - 2. Kepadatan Penduduk
 - 3. Laju pertumbuhan penduduk
- B. Penduduk menurut Karakteristik demografi meliputi :
 - 1. Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin
 - 2. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin
 - 3. Keluarga
 - 4. Penduduk menurut karakteristik sosial

Pengelompokan ini sangat berguna untuk :

- Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik lainnya.
- Menentukan /menetapkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan.
- Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan.
- Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya.
- Mengetahui proses demografi yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk.

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Bahwa persebaran atau distribusi penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Sementara itu, penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, jumlah dan persebaran penduduk meliputi :

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin/Kecamatan/Kelurahan

Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin per-Kecamatan dan perKelurahan merupakan salah satu informasi untuk mengetahui jumlah banyaknya orang-orang yang tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang Panjang mempunyai luas wilayah 2300 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 58.140 jiwa yang tersebar di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat. Secara rinci, jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/ kecamatan/kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 : Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Padang Panjang menurut Jenis Kelamin/Kecamatan/Kelurahan, Tahun 2019

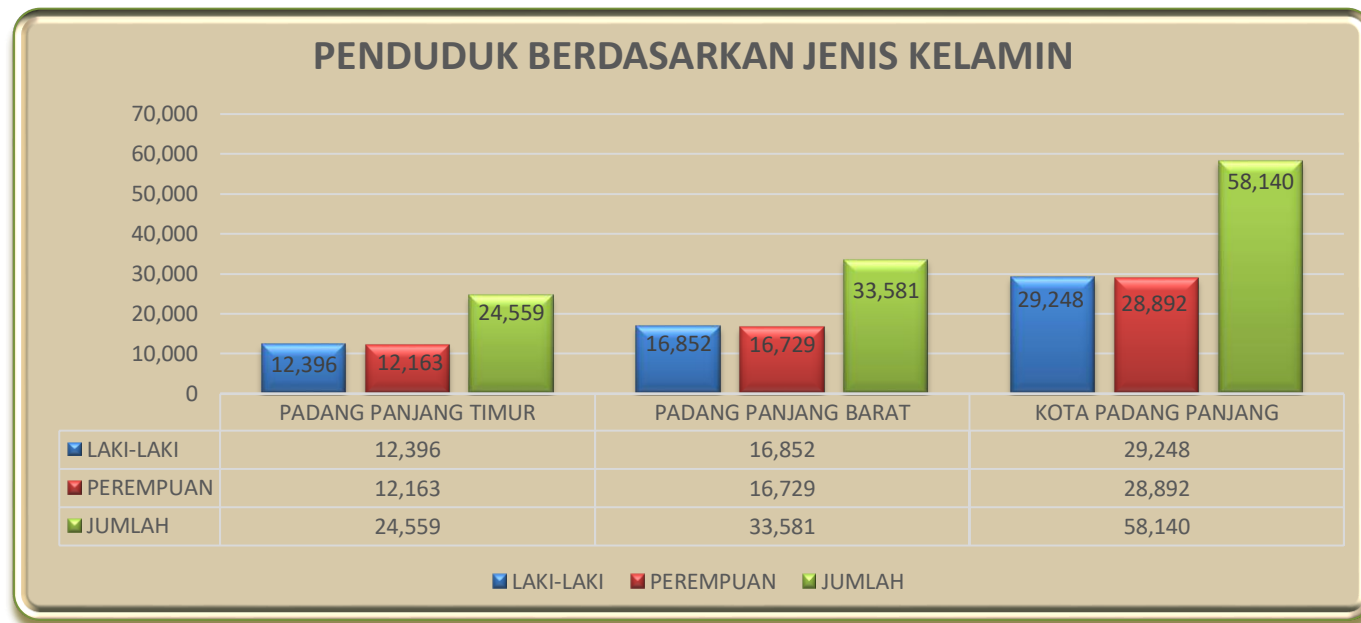
No	Kecamatan/Kelurahan	Penduduk					
		Lk	%	Pr	%	Jumlah	%
I	Kec. Padang Panjang Timur	12,396	42.38	12,163	42.10	24,559	42.24
1	Kel. Ganting	1,523	5.21	1,482	5.13	3,005	5.17
2	Kel. Sigando	970	3.32	916	3.17	1,886	3.24
3	Kel. Ekor Lubuk	1,323	4.52	1,280	4.43	2,603	4.48
4	Kel. Ngalau	1,521	5.20	1,546	5.35	3,067	5.28
5	Kel. Guguk Malintang	3,264	11.16	3,269	11.31	6,533	11.24
6	Kel. Koto Panjang	2,289	7.83	2,210	7.65	4,499	7.74
7	Kel. Koto Katik	579	1.98	557	1.93	1,136	1.95
8	Kel. Tanah Pak Lambik	927	3.17	903	3.13	1,830	3.15
II	Kec. Padang Panjang Barat	16,852	57.62	16,729	57.90	33,581	57.76
1	Kel. Bukit Surungan	1,290	4.41	1,295	4.48	2,585	4.45
2	Kel. Pasar Usang	1,923	6.57	1,953	6.76	3,876	6.67
3	Kel. Kampung Manggis	3,669	12.54	3,516	12.17	7,185	12.36
4	Kel. Silaing Bawah	3,026	10.35	2,982	10.32	6,008	10.33
5	Kel. Silaing Atas	1,285	4.39	1,244	4.31	2,529	4.35
6	Kel. Pasar Baru	816	2.79	812	2.81	1,628	2.80
7	Kel. Tanah Hitam	1,859	6.36	1,934	6.69	3,793	6.52
8	Kel. Balai-Balai	2,984	10.20	2,993	10.36	5,977	10.28
Jumlah		29,248	100.00	28,892	100.00	58,140	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kota Padang Panjang tahun 2019 berjumlah 58.140 jiwa, bila dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan dari 57.767 jiwa sebanyak 373 jiwa. Dari tabel 2, terlihat penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29,248 jiwa atau 50,31% dari jumlah penduduk Kota Padang Panjang dan perempuan sebanyak 28.892 jiwa atau 49,69%.

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa wilayah kecamatan Padang Panjang Barat mempunyai penduduk lebih besar yaitu sebanyak 33.581 jiwa atau 57.76 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Padang Panjang dibanding dengan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 24.559 jiwa atau 42,24 %. Perbedaan persebaran penduduk tersebut disebabkan wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat yang sedang berkembang baik dari segi pembangunan perumahan, domisili masyarakat, perdagangan maupun transportasi dan lain sebagainya. Disisi lain, pusat Pemerintahan Kota Padang Panjang juga berada di wilayah kecamatan Padang Panjang Barat sehingga persebaran penduduk juga lebih besar.

Dari sisi pemerintahan, jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan yaitu 8 (delapan) kelurahan, bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat mempunyai luas lebih kecil dibanding Kecamatan Padang Panjang Timur akan tetapi wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur masih banyak terdapat lahan pertanian sehingga kepadatan penduduknya lebih rendah dari Kecamatan Padang Panjang Barat.



Gambar 2 : Grafik Distribusi Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 (DKB Semester 2 Tahun 2019)

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan keruangan.

Untuk menghitung rasio kepadatan penduduk atau jumlah rata-rata penduduk setiap km² ini, digunakan rumus yaitu Jumlah Penduduk (jiwa) dibagi dengan Luas wilayah (km²) atau melalui rumus sebagai berikut:

$$D = P/A$$

D = Rasio Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
P = Jumlah Penduduk (jiwa)
A = Luas Wilayah (Km²)

Disamping itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau wilayah, antara lain :

- Faktor fisiografis
Penduduk selalu memilih tempat tinggal yang baik, strategis, tanah subur, relief baik, cukup air dan daerah aman.
- Faktor biologi
Tingkat pertumbuhan penduduk berbeda-beda karena adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran dan angka perkawinan.
- Faktor kebudayaan dan teknologi
Daerah yang masyarakatnya maju, pola berfikirnya bagus, dan keadaan pembangunan fisiknya maju, maka akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah terbelakang.

Berdasarkan tingkat kepadatan, Kota Padang Panjang tergolong kota yang penduduknya sangat padat, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah dimana diperlihatkan kepadatan penduduk di Kota Padang Panjang dengan luas 23 km² dihuni oleh 58.140 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 2.528 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km² luas Kota Padang Panjang didiami oleh 2.528 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 kepadatan penduduk sebesar 2.459 jiwa/ km², jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan kepadatan penduduk menjadi 69 jiwa/km². Hal ini tentu menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah terutama dalam membuat kebijakan terkait persebaran penduduk di Kota Padang Panjang.

Tabel 3 : Rasio Kepadatan Penduduk berdasarkan luas wilayah/Kecamatan/Kelurahan, Tahun 2019

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas Daerah (KM ²)	Jumlah Penduduk	Rasio Kepadatan Penduduk
I	Kec. Padang Panjang Timur	13.25	24,559	1,854
1	Kel. Ganting	3.10	3,005	969
2	Kel. Sigando	1.40	1,886	1,347
3	Kel. Ekor Lubuk	2.80	2,603	930
4	Kel. Ngalau	1.45	3,067	2,115
5	Kel. Guguk Malintang	1.90	6,533	3,438
6	Kel. Koto Panjang	1.33	4,499	3,383
7	Kel. Koto Katik	1.01	1,136	1,125
8	Kel. Tanah Pak Lambik	0.26	1,830	7,038
II	Kec. Padang Panjang Barat	9.75	33,581	3,444
u 1	Kel. Bukit Surungan	1.21	2,585	2,136
m 2	Kel. Pasar Usang	0.59	3,876	6,569
b 3	Kel. Kampung Manggis	3.16	7,185	2,274
e 4	Kel. Silaing Bawah	2.61	6,008	2,302
r 5	Kel. Silaing Atas	0.54	2,529	4,683
6	Kel. Pasar Baru	0.23	1,628	7,078
7	Kel. Tanah Hitam	0.72	3,793	5,268
8	Kel. Balai-Balai	0.69	5,977	8,662
	Jumlah	23.00	58,140	2,528

ta DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Jika dilihat kepadatan penduduk perkecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat dengan kepadatan sebesar 3.444 jiwa/km² dan Kecamatan Padang Panjang Timur hanya sebesar 1.854 jiwa/km². Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat jauh lebih padat dibandingkan dengan kecamatan Padang Panjang Timur. Hal ini dikarenakan wilayah Padang Panjang Timur merupakan dominan wilayah pertanian, sedangkan wilayah Padang Panjang Barat lebih dominan untuk permukiman dan perkantoran. Untuk Kecamatan Padang Panjang Barat, kelurahan terpadat yaitu Kelurahan Balai-Balai dengan rasio 8.662 jiwa/km², sedangkan untuk Kecamatan Padang Panjang Timur adalah Kelurahan Tanah Pak Lambik dengan rasio 7.038 jiwa/km².

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk yang membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk, yaitu: tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1 – 50 jiwa/km²; kurang padat antara 51 – 250 jiwa/ km²; cukup padat 251 – 400 jiwa/ km²; dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km², maka Kota Padang Panjang tergolong daerah yang berpenduduk sangat padat yaitu lebih besar dari 401 jiwa/km², yakni 2.528 jiwa/km².

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

A. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (menambah jumlah penduduk) tetapi disisi lain akan dikurangi oleh angka kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu *Fertilitas*, *Mortalitas*, dan *Migrasi* (Masuk/*inimigration* dan keluar/*outmigration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*refroductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (*net migration*).

Untuk menghitung jumlah penduduk dapat menggunakan rumus :

$$P_t = P_o + (B-D) = (M_i - M_o)$$

- P_t = Jumlah penduduk pada tahun t
- P = Jumlah Penduduk pada tahun dasar (o)
- B (*birt*) = Jumlah kelahiran selama periode $o-t$
- D (*death*) = Jumlah kematian selama periode $o-t$
- M_i = Jumlah migrasi masuk selama periode $o-t$
- M_o = Jumlah migrasi keluar selama periode $o-t$

Namun demikian, dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk dimasa depan, dengan menggunakan rumus perhitungan pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

$$P_t = P_o . e^{rt}$$

- P_t : Jumlah Penduduk tahun t
- P_o : Jumlah Penduduk pada tahun dasar/ awal (0)
- r : Angka Pertumbuhan Penduduk
- t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t
- e : Fungsi eksponensial = 2,7182818

Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh angka pertumbuhan penduduk **0,65**.

No	Kecamatan/Kelurahan	2018	%	2019	%	Pertumbuhan
I	Padang Panjang Timur	24.289	42,05	24.559	42,24	1,11
1	Kel. Ganting	2.934	5,08	3.005	5,17	2,42
2	Kel. Sigando	1.887	3,27	1.886	3,24	(0,05)
3	Kel. Ekor Lubuk	2.621	4,54	2.603	4,48	(0,69)
4	Kel. Ngalau	3.009	5,21	3.067	5,28	1,93
5	Kel. Guguk Malintang	6.427	11,13	6.533	11,24	1,65
6	Kel. Koto Panjang	4.424	7,66	4.499	7,74	1,70
7	Kel. Koto Katik	1.108	1,92	1.136	1,95	2,53
8	Kel. Tanah Pak Lambik	1.879	3,25	1.830	3,15	(2,61)
II	Padang Panjang Barat	33.478	57,95	33.581	57,76	0,31
1	Kel. Bukit Surungan	2.567	4,44	2.585	4,45	0,70
2	Kel. Pasar Usang	3.929	6,80	3.876	6,67	(1,35)
3	Kel. Kampung Manggis	7.118	12,32	7.185	12,36	0,94
4	Kel. Silaing Bawah	5.939	10,28	6.008	10,33	1,16
5	Kel. Silaing Atas	2.581	4,47	2.529	4,35	(2,01)
6	Kel. Pasar Baru	1.643	2,84	1.628	2,80	(0,91)
7	Kel. Tanah Hitam	3.714	6,43	3.793	6,52	2,13
8	Kel. Balai-Balai	5.987	10,36	5.977	10,28	(0,17)
Jumlah		57.767	100,00	58.140	100,00	0,65

Tabel 4 :Tabel Pertumbuhan Penduduk Th. 2019

Angka pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dari Desember Tahun 2018 ke Desember Tahun 2019 yakni dari 57.767 jiwa menjadi 58.140 jiwa. Selama kurun waktu tersebut terjadi kenaikan sebanyak 373 jiwa. Adapun angka pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah sebesar 0,65. Jumlah penduduk ini dihitung berdasarkan data penduduk pada program SIAK dan telah di bersihkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jika dilihat menurut kecamatan, maka pertumbuhan penduduk di Kecamatan Padang Panjang Timur lebih tinggi dari Kecamatan Padang Panjang Barat.

B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pengelompokan penduduk menurut usia sekolah (SD=7-12 tahun; SLTP=13-15 tahun; SLTA = 16-18 tahun; dan perguruan tinggi = 19 – 24 tahun). Berdasarkan struktur umur penduduk, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu:

- Penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun.
- Penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15-59 tahun.

- Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 60 tahun keatas (mengikuti ketetapan WHO).

Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk disuatu wilayah termasuk kelompok umur muda atau tua. **Penduduk suatu wilayah dianggap muda apabila jumlah penduduk yang berumur dibawah 15 tahun mencapai 40 persen atau lebih.**

Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan investasi sosial ekonomi yang berbeda dengan investasi untuk kelompok penduduk tua. Kelompok penduduk muda membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sandang, dan sebagainya. Sementara kelompok penduduk tua juga membutuhkan fasilitas-fasilitas tersebut namun tentu berbeda dari segi prioritasnya.

Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

- Umur Median (Median Age)
- Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
- Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (Depedency ratio)
Pengelompokan ini sangat berguna untuk :
 - Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada menurut jenis kelamin, umur maupun karakteristik lainnya.
 - Menentukan/menetapkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan
 - Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan
 - Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya
 - Mengetahui proses demografi yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk.

B. Penduduk menurut Karakteristik Demografi

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

- Umur Median (Median Age)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. **Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.**

Berdasarkan umur median, penduduk disuatu daerah dikategorikan sebagai berikut :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Untuk menghitung umur median digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Umur Median (Md)} = I_{md} + \frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{md}} \times i$$

I_{Md} = Batas kelompok umur yang mengandung $N/2$

N = Jumlah penduduk total

F_x = Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2$

F_{Md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai $N/2$

I = Kelas interval umum

Untuk melihat kategori penduduk Kota Padang Panjang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 : Tabel Distribusi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
1	0-4Thn	4,833	4,833	8.31
2	5-9Thn	5,644	10,477	18.02
3	10-14Thn	5,509	15,986	27.50
4	15-19Thn	5,274	21,260	36.57
5	20-24Thn	5,040	26,300	45.24
6	25-29Thn	4,588	30,888	53.13
7	30-34Thn	4,443	35,331	60.77
8	35-39Thn	4,402	39,733	68.34
9	40-44Thn	3,948	43,681	75.13
10	45-49Thn	3,453	47,134	81.07
11	50-54Thn	3,080	50,214	86.37
12	55-59Thn	2,606	52,820	90.85
13	60-64Thn	2,001	54,821	94.29
14	65-69Thn	1,452	56,273	96.79
15	70-74Thn	703	56,976	98.00
16	>74Thn	1,164	58,140	100.00
JUMLAH		58,140		

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung umur median penduduk Kota Padang Panjang sebagai berikut :

$$Md = 29 + \left[\frac{(58.140/2) - 30.888}{4.588} \right] \times 5 = 29 + \left[\frac{29.070 - 30.888}{4.588} \right] \times 5$$

$$Md = 29 + (-1.818 / 4.588) \times 5 = 29 + (-0,40) \times 5$$

$$Md = 29 + (-2) = 27 \text{ Tahun}$$

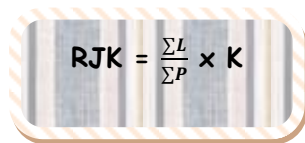
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka umur median (umur rata-rata) penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah 27 tahun yang berarti bahwa setengah dari penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2019 berusia dibawah 27 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 27 tahun. Umur median ini terletak antara 20 – 30 tahun, sehingga penduduk Kota Padang Panjang dapat dikategorikan penduduk intermediate yaitu transisi dari muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*).

a. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*), biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103 – 105 bagi laki-laki per 100 bayi perempuan.
- Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender (jenis kelamin), terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, rasio jenis kelamin juga berguna untuk urusan politik terutama untuk mengetahui seberapa besar keterwakilan perempuan di parlemen. Dengan menggunakan rumus hitung rasio jenis kelamin sebagai berikut :



$$RJK = \frac{\sum L}{\sum P} \times K$$

- RJK** = *Rasio Jenis Kelamin*
- Σ L** = *Jumlah Penduduk Laki-laki*
- Σ P** = *Jumlah Penduduk Perempuan*
- K** = *100 penduduk perempuan*

Maka gambaran penduduk Kota Padang Panjang berdasarkan rasio jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 : Tabel Distribusi Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin (RJK), Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
00-04	2,478	2,355	4,833	105.22
05-09	2,980	2,664	5,644	111.86
10-14	2,873	2,636	5,509	108.99
15-19	2,716	2,558	5,274	106.18
20-24	2,593	2,447	5,040	105.97
25-29	2,252	2,336	4,588	96.40
30-34	2,201	2,242	4,443	98.17
35-39	2,281	2,121	4,402	107.54
40-44	2,057	1,891	3,948	108.78
45-49	1,691	1,762	3,453	95.97
50-54	1,516	1,564	3,080	96.93
55-59	1,281	1,325	2,606	96.68
60-64	971	1,030	2,001	94.27
65-69	668	784	1,452	85.20
70-74	268	435	703	61.61
75+	422	742	1,164	56.87
Total	29,248	28,892	58,140	101.23

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar 101,23. Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kota Padang Panjang terdapat 101 orang penduduk laki-laki.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk, maka didapat Rasio Jenis Kelamin (sex ratio) per kecamatan / kelurahan seperti gambar pada tabel 7 berikut.

Tabel 7 : Tabel Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk, Tahun 2019

No	Kecamatan/Kelurahan	Laki2	Perempuan	Jumlah	RJK
I	Padang Panjang Timur	12,396	12,163	24,559	101.92
1	Kel. Ganting	1,523	1,482	3,005	102.77
2	Kel. Sigando	970	916	1,886	105.90
3	Kel. Ekor Lubuk	1,323	1,280	2,603	103.36
4	Kel. Ngalau	1,521	1,546	3,067	98.38
5	Kel. Guguk Malintang	3,264	3,269	6,533	99.85
6	Kel. Koto Panjang	2,289	2,210	4,499	103.57
7	Kel. Koto Katik	579	557	1,136	103.95
8	Kel. Tanah Pak Lambik	927	903	1,830	102.66
II	Kec. Padang Panjang Barat	16,852	16,729	33,581	100.74
1	Kel. Bukit Surungan	1,290	1,295	2,585	99.61
2	Kel. Pasar Usang	1,923	1,953	3,876	98.46
3	Kel. Kampung Manggis	3,669	3,516	7,185	104.35
4	Kel. Silaing Bawah	3,026	2,982	6,008	101.48
5	Kel. Silaing Atas	1,285	1,244	2,529	103.30
6	Kel. Pasar Baru	816	812	1,628	100.49
7	Kel. Tanah Hitam	1,859	1,934	3,793	96.12
8	Kel. Balai-Balai	2,984	2,993	5,977	99.70
	Jumlah	29,248	28,892	58,140	101.23

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 2 kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang terdapat 5 kelurahan yang menunjukkan angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di bawah 100 persen yaitu Kelurahan Ngalau, Guguk Malintang, Pasar Usang, Bukit Surungan, Tanah Hitam dan Kelurahan Balai-Balai, artinya di 6 kelurahan ini jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki atau dari 100 orang laki-laki terdapat perempuan dengan jumlah lebih besar dari 100. Sedangkan untuk kelurahan yang lain memiliki angka rasio jenis kelamin diatas 100% yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 100 orang laki-laki terdapat penduduk perempuan kurang dari 100 orang.

b. Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin (lihat tabel 6) yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan absolut atau persentase. Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan keatas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan kelompok umur terbuka (75+) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*mobilitas*). Piramida penduduk juga dibedakan atas tiga ciri, yaitu ekspansif (*espansive*) dimana pada ciri ini mempunyai lebar pada bagian dasar piramida yang menunjukkan proporsi penduduk muda yang besar dan kecilnya proporsi penduduk tua, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ciri kedua adalah Konstriktif (*konstriktive*) dimana pada ciri ini bagian dasar piramida kecil dan bagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda. Ciri ketiga adalah Stasioner (*Stationary*) yaitu bagian dasar piramida kecil, penduduk dalam setiap kelompok umur hampir sama banyaknya dan mengecil pada usia tua.

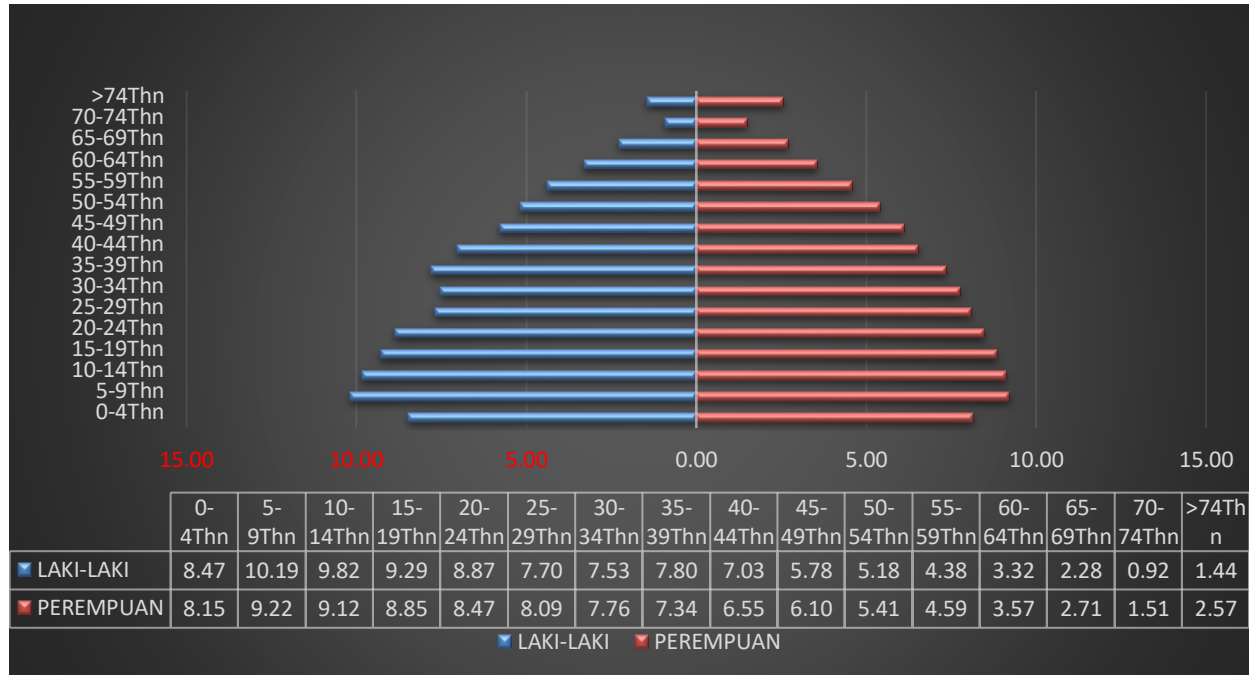
Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk dimasa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.

Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2019

Gambar 3 : Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2019

Sumber : Data DKB Semester 2 tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang



Berdasarkan gambar piramida penduduk, Kota Padang Panjang saat ini didominasi oleh penduduk usia sekolah yakni pada usia 5-9 Tahun, diikuti oleh penduduk berusia 15-19 Tahun yang menempati urutan kedua dari jumlah penduduk. Hal ini berarti penduduk usia sekolah dan remaja dominan dalam struktur jumlah kependudukan di Kota Padang Panjang.

c. Rasio Ketergantungan (*Depedency Ratio*)

Konsepsi rasio ketergantungan (*depedency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dimana penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap masih produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

- **Rasio Ketergantungan Muda** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun.
- **Rasio Ketergantungan Tua** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun

Untuk menghitung Rasio Ketergantungan didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 RK_{\text{muda}} &= \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \times 100 \\
 RK_{\text{tua}} &= \frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100 \\
 RK_{\text{total}} &= \frac{(P_{0-14}) + (P_{65+})}{P_{15-64}} \times 100
 \end{aligned}$$

- RK_{Total} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda dan Tua
- RK_{Muda} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda
- RK_{Tua} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Tua
- $P_{(0-14)}$ = Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)
- $P_{(65+)}$ = Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas)
- $P_{(15-64)}$ = Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 -65 tahun)

Tabel 8 : Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2019

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total	%
	Laki-Laki	Perempuan		
0-14Thn (Umur Muda)	8,331	7,655	15,986	27.50
15-64Thn (Umur Produktif)	19,559	19,276	38,835	66.80
>65 Thn (Umur Tua)	1,358	1961	3,319	5.71
JUMLAH	29,248	28,892	58,140	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

Tabel 9 : Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Ketergantungan Tahun 2019

Kelompok Umur	Total	Kelompok Umur	Rasio Ketergantungan (%)
0-14Thn (Umur Muda)	15,986	0-14 Thn (Umur Muda)	41.16
15-64Thn (Umur Produktif)	38,835	15-64 Thn (Umur Produktif)	
>65 Thn (Umur Tua)	3,319	>65 Thn (Umur Tua)	8.55
RK Total	58.140	(Umur Muda + Umur Tua)	49.71

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

Berdasarkan tabel diatas perhitungan rasio ketergantungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Rkmuda &= (15.986 / 38.835) \times 100 \\
 &= 41,16 \% \\
 Rktua &= (3.319 / 38.835) \times 100 \\
 &= 8,55 \% \\
 Rktotal &= ((15.986 + 3.319) / 38.835) \times 100 \\
 &= 49,71 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, didapat rasio ketergantungan total adalah sebesar 49,71 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang (49,71%) yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 49,71 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 41,16 persen dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,55 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kota Padang Panjang dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2018.

2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin meliputi belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Dalam hal ini konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) .

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan Keluarga Berencana/pembangunan keluarga.

Tabel 10 : Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status Kawin Tahun 2019

Jenis Kelamin/ Kecamatan	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Laki-Laki										
Kec. Padang Panjang Timur	6,906	11.88	5,206	8.95	139	0.24	145	0.25	12,396	21.32
Kec. Padang Panjang Barat	9,428	16.22	7,038	12.11	204	0.35	182	0.31	16,852	28.99
Perempuan										
Kec. Padang Panjang Timur	5,703	9.81	5,359	9.22	278	0.48	823	1.42	12,163	20.92
Kec. Padang Panjang Barat	7,941	13.66	7,263	12.49	410	0.71	1,115	1.92	16,729	28.77
Laki- Laki + Perempuan										
Kec. Padang Panjang Timur	12,609	21.69	10,565	18.17	417	0.72	968	1.66	24,559	42.24
Kec. Padang Panjang Barat	17,369	29.87	14,301	24.60	614	1.06	1,297	2.23	33,581	57.76
Jumlah	29,978	51.56	24,866	42.77	1031	1.77	2,265	3.90	58,140	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang,diolah

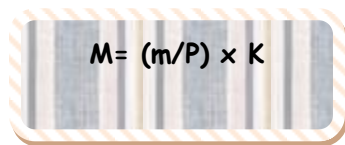
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa persentase jumlah penduduk yang belum kawin lebih besar dari lainnya (status kawin, cerai hidup, dan cerai mati) yaitu sebesar 51.56 %.

a. Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu.

Angka perkawinan kasar merupakan indikator yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Angka perkawinan kasar dihitung dengan menggunakan rumus :



$$M = (m/P) \times K$$

- M* = Angka Perkawinan Kasar
- m* = Jumlah Perkawinan dalam satu tahun
- P* = Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun yang sama
= $[Po+Pt]/2$, dimana *Po* adalah jumlah penduduk awal tahun dan *Pt* adalah jumlah penduduk akhir tahun.
- K* = Konstanta (1000)

Tabel 11 : Tabel Jumlah Perkawinan/Pernikahan Tahun 2019

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah
I	Padang Panjang Timur	145	II. Padang Panjang Barat	244
1	Ganting	22	Bukit Surungan	11
2	Sigando	13	Pasar Usang	28
3	Ekor Lubuk	8	Kampung Manggis	51
4	Ngalau	30	Silaiang Bawah	49
5	Guguk Malintang	24	Silaiang Atas	14

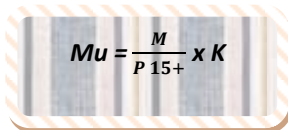
6	Koto Panjang	37	Pasar Baru	7
7	Koto Katiak	2	Tanah Hitam	24
8	Tanah Pak Lambiak	9	Tanah Pak Lambiak	60
Jumlah Padang Panjang Barat + Padang Panjang Timur 389 pernikahan				

Sumber : Data KUA Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur, Tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perkawinan pada tahun 2019 adalah sebanyak 389 peristiwa pernikahan/perkawinan. Dengan jumlah penduduk pada pertengahan Tahun 2019 (semester 1) sebanyak 57.656 jiwa, maka akan diperoleh angka perkawinan kasar yakni sebesar 6,75. Berarti bahwa pada tahun 2019 dari 1.000 jiwa penduduk Kota Padang Panjang terdapat 7 (tujuh) orang yang melaksanakan perkawinan.

b. Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum (AKU) menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Angka Perkawinan Umum (AKU) ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :



$$Mu = \frac{M}{P_{15+}} \times K$$

- Mu* = Angka Perkawinan Umum
- M* = Jumlah perkawinan dalam satu tahun
- P15+* = Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas
- K* = Konstanta (1000)

Berdasarkan data SIAK, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2019 adalah sebanyak 42.154 jiwa, sehingga dengan menggunakan rumus diatas didapat Angka Perkawinan Umum sebesar 9,23. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 dari 1.000 jiwa penduduk yang berusia 15 tahun keatas, terdapat 9 (Sembilan) orang yang melakukan perkawinan.

c. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Angka Perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap 1000 penduduk pada

kelompok umur yang sama. Indikator ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Angka perkawinan menurut kelompok umur dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$m_i^s = \frac{M_i^s}{P_i^s} \times K$$

- m_i^s = Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur (i) dan jenis kelamin (s)
- M_i^s = Jumlah perkawinan pada kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s) pada tahun tertentu.
- P_i^s = Jumlah Penduduk pada kelompok umur (I) dan jenis kelamin (s) .
- K = Konstanta (1000)

Tabel 12 : Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Perkawinan Tahun 2019

Umur	Jumlah penduduk			Jumlah penduduk berstatus kawin			Angka perkawinan		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
00-04	2,368	2,273	4,641	-	-	-	-	-	-
05-09	2,967	2,656	5,623	-	-	-	-	-	-
10-14	2,791	2,595	5,386	-	-	-	-	-	-
15-19	2,808	2,623	5,431	-	14	14	-	5.34	2.58
20-24	2,568	2,456	5,024	79	335	414	30.76	136.40	82.40
25-29	2,221	2,274	4,495	667	1,357	2,024	300.32	596.75	450.28
30-34	2,327	2,225	4,552	1,582	1,961	3,543	679.85	881.35	778.34
35-39	2,294	2,127	4,421	1,885	1,919	3,804	821.71	902.21	860.44
40-44	2,012	1,921	3,933	1,758	1,731	3,489	873.76	901.09	887.11
45-49	1,728	1,708	3,436	1,583	1,482	3,065	916.09	867.68	892.03
50-54	1,505	1,540	3,045	1,386	1,265	2,651	920.93	821.43	870.61
55-59	1,232	1,290	2,522	1,138	952	2,090	923.70	737.98	828.71
60-64	978	1,008	1,986	885	658	1,543	904.91	652.78	776.94
65-69	613	720	1,333	530	355	885	864.60	493.06	663.92
70-74	259	424	683	224	166	390	864.86	391.51	571.01
>=75	453	803	1,256	328	161	489	724.06	200.50	389.33
JML	29,248	28,892	58,140	12,244	12,622	24,866	418.63	436.87	427.69

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Dilihat dari tabel di atas, jumlah angka perkawinan penduduk Kota Padang Panjang :

- Berdasarkan umur dan jenis kelamin laki-laki adalah 418,63 yang artinya dari 1000 penduduk laki-laki terdapat 419 orang laki-laki yang berstatus kawin, di Kota Padang Panjang.

- Berdasarkan umur dan jenis kelamin perempuan adalah 436,87 yang artinya dari 1000 penduduk perempuan terdapat 437 orang perempuan yang berstatus kawin, di Kota Padang Panjang.
- Secara keseluruhan angka perkawinan tahun 2019 di Kota Padang Panjang adalah 427,69 yang artinya dari 1000 penduduk terdapat 428 penduduk berstatus kawin.

d. Rata-rata umur kawin pertama

Rata-rata umur kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Rata-rata umur kawin pertama adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Tersedianya indikator ini akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan terutama terhadap penduduk kelompok umur muda untuk menunda perkawinan dan agar dapat menyelesaikan pendidikan minimal pendidikan sembilan tahun.

Selain itu, umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin sedikit pula jumlah anak yang akan dilahirkannya. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek pula masa usia suburnya dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Perkawinan di usia muda cenderung memiliki banyak kendala, seperti dilihat dari sisi pendidikan, yaitu tingkat pendidikan yang ditamatkan cenderung akan semakin rendah .

Adapun langkah perhitungan rata-rata umur kawin pertama antara lain :

1. Menghitung jumlah kelangsungan hidup melajang penduduk sebelum tepat usia 15 tahun. Jika terdapat 100 orang dengan usia dibawah 15 tahun dengan status belum kawin (lajang), maka jumlah tahun yang dijalannya dengan melajang adalah : $100 \times 15 = 1.500$
2. Menghitung jumlah kelangsungan hidup melajang penduduk Kelompok umur 15-49 tahun. Pertama menjumlahkan persentase penduduk belum kawin pada kelompok umur 15-49 tahun, lalu dikalikan dengan 5 (yaitu interval umur 5 tahunan).

Tabel 13. Jumlah Penduduk Belum Kawin Menurut Kelompok Umur Kota Padang Panjang Tahun 2019

Kelompok Umur	Belum Kawin	Jumlah Penduduk	% single
15-19Thn	5,250	5,274	99,54
20-24Thn	4,606	5,040	91,39
25-29Thn	2,362	4,588	51,48
30-34Thn	802	4,443	18,05
35-39Thn	383	4,402	8,70
40-44Thn	225	3,948	5,70
45-49Thn	136	3,453	3,94
<i>Jumlah Prsentase single umur 15 - 49</i>			44,19
50-54Thn	74	3.080	2.40

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

3. Pada tabel 13, persentase penduduk dengan status belum kawin (lajang) adalah 278,81 % (Data Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2019), maka jumlah tahun kelangsungan hidup melajang (single) penduduk kelompok umur 15-49 tahun adalah : $278,81 \times 5$ (interval tahun) = 1.394,05 tahun.
4. Menjumlahkan kelangsungan hidup melajang penduduk sebelum berumur 50 tahun (0-49 tahun) yaitu dengan menjumlahkan point (1) dengan point (3), maka diperoleh : $1.500+1.394,05 = 2.894,05$ tahun.
5. Menghitung persentase penduduk dengan status belum kawin (lajang) tepat pada ulang tahun ke 50. Angka ini diperoleh dari penjumlahan persentase penduduk lajang pada kelompok umur 45-49 tahun dengan 50-54 tahun dibagi 2, yaitu : $(3,94+2,40) / 2 = 3,17$ persen.
6. Menghitung tahun kelangsungan hidup melajang penduduk sampai tepat berumur 50 tahun, yaitu dengan mengalikan point (5) dengan 50 (umur tepat 50 tahun) : $3,17 \times 50 = 158,5$ tahun.

7. Menghitung jumlah kelangsungan hidup penduduk kawin sampai tepat umur 50 tahun, yaitu dengan mengurangi point (4) dengan point (6), maka diperoleh: $2.894,05 - 158,5 = 2.735,55$ tahun kelangsungan hidup melajang dari kelompok penduduk yang menikah sebelum tepat berumur 50 tahun.
8. Menghitung jumlah penduduk sintesis (hipotesa) yang menikah sampai tepat berumur 50 tahun, yaitu dengan mengurangi dari 100 penduduk yang diasumsikan pada point (1) dengan point (5), maka hasilnya: $100 - 3,17 = 96,83$ persen.
9. Dari point (7) dan (8) dapat disimpulkan bahwa dari 96,83 persen penduduk sintesis yang menikah sampai tepat berumur 50 tahun mempunyai 2.735,55 tahun kelangsungan hidup melajang.
10. Menghitung rata-rata usia kawin pertama penduduk (*singulate mean age at marriage/SMAM*) yaitu dengan membagi poin (7) dengan poin (8), maka hasilnya : $2.735,55 / 96,83 = 28,25$ tahun.

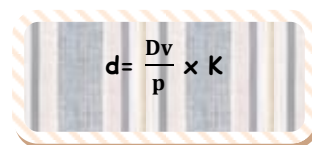
Sehingga di peroleh angka rata-rata usia kawin pertama penduduk Kota Padang Panjang yakni pada umur 28,25 tahun (28 tahun) dan ini merupakan usia kawin pertama yang cukup tinggi.

e. Angka Perceraian Kasar;

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka Perceraian Kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin.

Angka Perceraian Kasar (ACK) ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :



$$d = \frac{Dv}{p} \times K$$

- d = Angka Perceraian Kasar
- Dv = Jumlah Perceraian dalam satu tahun
- P = Jumlah Penddk pada pertengahan tahun yg sama = $[Po+Pt]/2$, dimana Po adalah jumlah awal tahun dan Pt adalah jumlah penduduk akhir tahun.
- K = Konstanta (1000)

Tabel 14 : Tabel Jumlah Terjadinya Perceraian Tahun 2019

No	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah
I	Kec. Padang Panjang Timur	41
1	Kel. Ganting	5
2	Kel. Sigando	2
3	Kel. Ekor Lubuk	5
4	Kel. Ngalau	7
5	Kel. Guguk Malintang	11
6	Kel. Koto Panjang	7
7	Kel. Koto Katik	2
8	Kel. Tanah Pak Lambik	2
II.	Kec. Padang Panjang Barat	61
1	Kel. Bukit Surungan	5
2	Kel. Pasar Usang	8
3	Kel. Kampung Manggis	18
4	Kel. Silaing Bawah	10
5	Kel. Silaing Atas	6
6	Kel. Pasar Baru	2
7	Kel. Tanah Hitam	3
8	Kel. Balai-Balai	9
	Jumlah	102

Sumber : Pengadilan Agama Kota Padang Panjang Tahun 2019

Berdasarkan data yang ada, jumlah perceraian tahun 2019 adalah sebanyak 102 kasus perceraian, jika jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2019 adalah sebesar 57.954 jiwa, maka akan didapat Angka Perceraian Kasar sebesar 1,76. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 dari setiap 1.000 jiwa penduduk terjadi 2 (dua) peristiwa perceraian. Penyebab terjadinya perceraian tidak dapat dijelaskan karena data yang ada hanya menggambarkan jumlah kasus perceraian yang terjadi sepanjang Tahun 2019 di Kota Padang Panjang.

f. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu. Angka Perceraian Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perceraian Kasar.

Angka Perceraian Umum (ACU) ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$d_u = \frac{D_v}{P_{15+}} \times K$$

- d_u = Angka Perceraian Umum
- D_v = Jumlah Perceraian dalam satu tahun
- P_{15+} = Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas
- K = Konstanta (1000)

Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2019 adalah sebanyak 42.154 jiwa, dengan menggunakan rumus diatas, akan diperoleh Angka Perceraian Umum sebesar 2,42. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 dari 1000 jiwa penduduk yang berusia 15 tahun keatas, 2 (dua) orang diantaranya melakukan perceraian, dengan artian 2 kasus dalam 1000 orang penduduk.

3. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

Keluarga dapat dibagi 2 (dua) tipe yaitu :

- **Keluarga inti (Nuclear Family)**, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- **Keluarga Luas (Extended Family)**, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

a. Jumlah Keluarga Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil. Rata-rata jumlah anggota keluarga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\overline{AK} = \frac{\sum Pddk}{\sum KK}$$

\overline{AK} = Rata-Rata jumlah anggota keluarga
 $\sum Pddk$ = Jumlah Penduduk
 $\sum KK$ = Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Tabel 15 : Tabel Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
Padang Panjang Timur	24.559	6.766	3,63
Padang Panjang Barat	33.581	9.280	3,62
Jumlah	58.140	16.046	3,62

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Dari tabel diatas terlihat rata-rata anggota keluarga di Kota Padang Panjang sebesar 3,62. Artinya bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di masing-masing keluarga yang ada di Kota Padang Panjang berkisar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang, yang merupakan keluarga inti.

b. Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga ataupun famili lain.

Tabel 16 : Tabel Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Tahun 2019

Status Hubungan Dalam Keluarga	Laki-laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kepala keluarga	13,035	22,42	3.011	5,18	16.046	27,60
Suami	4	0,01	-	0,00	4	0,01
Istri	0	0,00	11.874	20,42	11.874	20,42

Anak	14.832	25,51	12.611	21,69	27.443	47,20
Menantu	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Cucu	169	0,29	152	0,26	321	0,55
Orang tua	17	0,03	121	0,21	138	0,24
Mertua	36	0,06	259	0,45	295	0,51
Famili lain	1.105	1,90	825	1,42	1.930	3,32
Pembantu	0	0,00	2	0,00	2	0,00
Lainnya	50	0,09	36	0,06	86	0,15
Jumlah	29.248	50,31	28.892	49,69	58.140	100,00

Pada tabel terlihat bahwa Kepala Keluarga laki-laki sebanyak 13.035 dan perempuan sebagai Kepala Keluarga sebanyak 3.011, ini menunjukkan bahwa Kepala Keluarga dominan laki-laki di Kota Padang Panjang. Kemudian dari tabel juga terlihat jumlah penduduk berstatus famili lain, pembantu dan lainnya yang bukan merupakan keluarga inti sebanyak 2.018 orang atau sekitar 3,47% dari total jumlah penduduk.

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019
Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 17 : Tabel Distribusi Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
15-19	13	0.08	4	0.02	17	0.11
20-24	143	0.89	31	0.19	174	1.08
25-29	822	5.12	106	0.66	928	5.78
30-34	1,606	10.01	121	0.75	1,727	10.76
35-39	1,992	12.41	171	1.07	2,163	13.48
40-44	1,887	11.76	204	1.27	2,091	13.03
45-49	1,611	10.04	282	1.76	1,893	11.80
50-54	1,475	9.19	316	1.97	1,791	11.16

55-59	1,255	7.82	382	2.38	1,637	10.20
60-64	945	5.89	374	2.33	1,319	8.22
65-69	649	4.04	374	2.33	1,023	6.38
70-74	256	1.60	239	1.49	495	3.08
75+	381	2.37	407	2.54	788	4.91
TOTAL	13,035	81.24	3,011	18.76	16,046	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang proporsi Kepala Keluarga Laki-laki tertinggi berada pada kelompok umur 35 s/d 39 tahun yaitu 12,41 %, sedangkan proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada pada kelompok umur >75 tahun yaitu sebesar 2,54 %, hal ini diperkirakan karena kepala keluarga laki-laki yang meninggal (cerai mati maupun cerai hidup) sehingga istri berperan sebagai Kepala Keluarga dalam kehidupannya.

d. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungan dimasa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) ataupun dari segi kemandirian seorang perempuan dalam melanjutkan kelangsungan hidup keluarganya.

Tabel 18 : Tabel Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan Tahun 2019

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk						Kepala Keluarga					
	PP Timur		PP Barat		Total		PP Timur		PP Barat		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
L	12,396	50.47	16,852	50.18	29,248	50.31	5,520	81.58	7,515	80.98	13,035	81.24
P	12,163	49.53	16,729	49.82	28,892	49.69	1,246	18.42	1,765	19.02	3,011	18.76
Jumlah	24,559	100.00	33,581	100.00	58,140	100.00	6,766	100.00	9,280	100.00	16,046	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Tabel diatas menunjukkan persentase Kepala Keluarga laki-laki di Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar 80,98 % dan Kepala Keluarga perempuan sebesar 19,02 %. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur Kepala Keluarga laki-laki sebanyak 81,58% dan Kepala Keluarga perempuan sebesar 18,42%. Secara keseluruhan di Kota Padang Panjang sebesar 81,24 % Kepala Keluarga laki-laki dan 18,76 % Kepala Keluarga perempuan.

e. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah atau tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel 19 : Tabel Kepala Keluarga menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Status Kawin	Kepala Keluarga					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Belum Kawin	304	2.33	157	5.21	461	2.87
Kawin	12,169	93.36	646	21.45	12,815	79.86
Cerai Hidup	283	2.17	626	20.79	909	5.66
Cerai Mati	279	2.14	1,582	52.54	1,861	11.60
Jumlah	13,035	100.00	3,011	100.00	16,046	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

Dari tabel ini terlihat bahwa secara umum Kepala Keluarga di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 berstatus kawin yakni 79,86 % dan kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) 2,87 %. Selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) sebanyak 17,26%.

f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 20 : Tabel Karakteristik Kepala Keluarga menurut Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan	Kepala Keluarga					
	Laki-laki		Perempuan		L + P	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Tidak/ Belum Sekolah	73	0.56	63	2.09	136	0.85
Belum Tamat SD	447	3.43	225	7.47	672	4.19
Tamat SD	1,559	11.96	608	20.19	2,167	13.50
Tamat SLTP	2,250	17.26	588	19.53	2,838	17.69
Tamat SLTA	5,878	45.09	1,006	33.41	6,884	42.90
Tamat DI/DII	193	1.48	95	3.16	288	1.79
Tamat DIII	507	3.89	119	3.95	626	3.90
Tamat S1	1,843	14.14	278	9.23	2,121	13.22
Tamat S2	266	2.04	25	0.83	291	1.81
Tamat S3	19	0.15	4	0.13	23	0.14
Jumlah	13,035	100.00	3,011	100.00	16,046	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Keluarga di Kota Padang Panjang berpendidikan SLTA/Sederajat sebesar 42,90 %, sedangkan Kepala Keluarga dengan tingkat pendidikan S1/S2/S3 hanya 15,18 %.

g. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pertambahan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 21 : Tabel Distribusi Kepala Keluarga menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Status Bekerja	Kepala Keluarga					
	Laki-laki		Perempuan		L + P	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Belum/Tidak Bekerja	168	1.05	93	0.58	261	1.63

Aparatur/Pejabat Negara	1,720	10.72	193	1.20	1,913	11.92
Tenaga Pengajar	280	1.74	83	0.52	363	2.26
Wiraswasta	9,406	58.62	624	3.89	10,030	62.51
Pertanian/Peternakan	874	5.45	125	0.78	999	6.23
Nelayan	7	0.04	-	-	7	0.04
Agama Dan Kepercayaan	24	0.15	1	0.01	25	0.16
Pelajar/Mahasiswa	51	0.32	28	0.17	79	0.49
Tenaga Kesehatan	22	0.14	13	0.08	35	0.22
Pensiunan	482	3.00	181	1.13	663	4.13
Lainnya	1	0.01	1,670	10.41	1,671	10.41
Jumlah	13,035	81.24	3,011	18.76	16,046	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

Berdasarkan tabel diatas sekitar 83.83 % Kepala Keluarga di Kota Padang Panjang bekerja, baik itu sebagai aparatur, tenaga pengajar, wiraswasta, pertanian/peternakan, nelayan, agama, tenaga kesehatan. Angka Kepala Keluarga laki-laki yang bekerja 77,18% lebih tinggi dibandingkan dengan angka Kepala Keluarga perempuan yang juga bekerja (6,64%). Sementara Kepala Keluarga sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja sebanyak 1,63%.

4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu kabupaten/kota sekaligus kualitas SDM.

Tabel 22 : Tabel Distribusi Penduduk menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		L + P	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Tidak/Belum Sekolah	4,432	15.15	4,164	14.41	8,596	14.79
Belum Tamat SD/Sederajat	4,473	15.29	3,996	13.83	8,469	14.57
Tamat SD/Sederajat	3,202	10.95	3,098	10.72	6,300	10.84
SLTP/Sederajat	4,238	14.49	3,706	12.83	7,944	13.66
SLTA/Sederajat	9,342	31.94	8,369	28.97	17,711	30.46

Diploma I/II	225	0.77	638	2.21	863	1.48
Diploma III	626	2.14	1,307	4.52	1,933	3.32
Diploma IV/ Strata-I	2,401	8.21	3,338	11.55	5,739	9.87
Strata II	289	0.99	264	0.91	553	0.95
Strata III	20	0.07	12	0.04	32	0.06
Jumlah	29,248	100.00	28,892	100.00	58,140	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2019, rata-rata pendidikan penduduk Kota Padang Panjang adalah setingkat SLTA/ sederajat atau sebesar 30,46 % dari jumlah penduduk sebanyak 58.140 jiwa, kemudian diikuti penduduk yang belum/tidak sekolah sebesar 14,79 %.

b. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Yang dimaksud dengan "tamat" adalah mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sampai akhir dengan mendapat tanda tamat/ijazah, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Tabel 23: Tabel Distribusi Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		L + P	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Tidak/Belum Sekolah	4,432	15.15	4,164	14.41	8,596	14.79
Belum Tamat SD/Sederajat	4,473	15.29	3,996	13.83	8,469	14.57
Tamat SD/Sederajat	3,202	10.95	3,098	10.72	6,300	10.84
SLTP/Sederajat	4,238	14.49	3,706	12.83	7,944	13.66
SLTA/Sederajat	9,342	31.94	8,369	28.97	17,711	30.46
Diploma I/II	225	0.77	638	2.21	863	1.48
Diploma III	626	2.14	1,307	4.52	1,933	3.32
Diploma IV/ Strata-I	2,401	8.21	3,338	11.55	5,739	9.87
Strata II	289	0.99	264	0.91	553	0.95
Strata III	20	0.07	12	0.04	32	0.06
Jumlah	29,248	100.00	28,892	100.00	58,140	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa tingkat pendidikan tertinggi penduduk di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah jenjang pendidikan Strata III (S3), yakni sebanyak 32 orang atau sebesar 0,06 % dari keseluruhan penduduk Padang Panjang. Secara umum tingkat pendidikan penduduk Kota Padang Panjang adalah tamat SLTA/ sederajat, yakni sebanyak 17.711 (30,46%) dari 58.140 jiwa penduduk Kota Padang Panjang.

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan per kecamatan dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha).

Tabel 24 : Tabel Distribusi Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan Tahun 2019

Agama dan Kepercayaan	Padang Panjang Timur		Padang Panjang Barat		TOTAL	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Islam	24,279	41.76	33,058	56.86	57,337	98.62
Kristen	148	0.25	231	0.40	379	0.65
Katholik	132	0.23	242	0.42	374	0.64
Hindu	-	-	-	-	-	-
Budha	-	-	49	0.08	49	0.08
Konghucu	-	-	1	0.00	1	0.00
Kepercayaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	24,559	42.24	33,581	57.76	58,140	100.00

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa di tiap kecamatan di Kota Padang Panjang mayoritas penduduknya beragama Islam, jumlah penduduk yang beragama Islam di Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar 24.279 (41,76%) dan di Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar 33.058 (56,86 %), jadi secara keseluruhan di Kota Padang Panjang terdapat 57.337 penduduk beragama Islam (98,62 %).

d. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus. Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin.

Tabel 25 : Tabel Distribusi Penduduk menurut Jenis Kecacatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Jenis Kecacatan	Laki-laki		Perempuan		L + P	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Cacat Fisik	10	0.02	9	0.02	19	0.03
Cacat Netra/ Buta	5	0.01	2	0.00	7	0.01
Cacat Rungu/ Wicara	10	0.02	4	0.01	14	0.02
Cacat Mental/ Jiwa	10	0.02	5	0.01	15	0.03
Cacat Fisik dan Mental	2	0.00	-	-	2	0.00
Cacat Lainnya	6	0.01	2	0.00	8	0.01
Jumlah	43	0.07	22	0.04	65	0.11

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

Dari data yang terdapat pada tabel diatas, bahwa penduduk yang mengalami kecacatan ada 65 jiwa dengan beragam jenis kecacatan, yaitu cacat fisik, cacat netra, cacat jiwa dan lain-lain. Jumlah terbesar berada pada penyandang cacat fisik dengan jumlah penyandang cacat sebanyak 19 jiwa dengan rincian 10 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

BAB. IV KUALITAS PENDUDUK KOTA PADANG PANJANG

A. Kesehatan

1. Kelahiran (*Fertilitas*)

a. Angka Kelahiran

Angka kelahiran merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) menurut kelompok umur yang sama. Perhitungan Angka Kelahiran menurut kelompok umur dengan rumus sebagai berikut :

$$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i^f} \times K$$

ASFR_i = *Age Spesific Fertility Rate (Angka Kelahiran)* untuk perempuan, dimana :

B_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur *i*.

P_i^f = Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur *i*.

K = Konstanta (1.000)

Tabel 26 : Tabel Jumlah Kelahiran Tahun 2019

Σ Perempuan (usia 15-49 th)	Σ Kelahiran Hidup	% Angka Kelahiran
15.357	1.033	67,27 %

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh Angka Kelahiran Hidup pada tahun 2019 adalah Jumlah Kelahiran Hidup (Data DKK 2019) dibagi jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) /Data DKB Semester 2 tahun 2019 Dinas Dukcapil dikali 1000 (Konstanta), maka didapat angka kelahiran sebesar 67,27 %

b. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/ CWR*)

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak dibawah lima tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15 – 49 tahun. Untuk menghitung rasio anak dan perempuan digunakan rumus :

$$CWR = \frac{P_{0-4}}{P_{15-49}} \times K$$

CWR = *Rasio Anak dan Perempuan*

P(0-4) = *Jumlah penduduk dibawah 5 tahun (0-4 tahun)*

P(15-49) = *Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun*

K = *Konstanta (100)*

Tabel 27: Tabel Rasio Anak dan Penduduk Perempuan Tahun 2019

Kecamatan	Penduduk usia 0-4 tahun	Penduduk Perempuan usia 15-49 tahun	Rasio Anak dan Perempuan
Kec. Padang Panjang Timur	2.044	6.505	31,42
Kec. Padang Panjang Barat	2.789	8.852	31,51
Total Kota Padang Panjang	4.833	15.357	31,47

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil, diolah.

Angka pada tabel diatas menunjukkan rasio anak dan perempuan di Kota Padang Panjang tahun 2019. Angka sebesar 31,47 artinya bahwa pada tahun 2019 dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun terdapat 30 anak dibawah usia 5 th (0-4) tahun.

2. Kematian (Mortalitas)

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan dibidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Adapun indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan disuatu daerah adalah :

a. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu.

$$AKB (IMR) = \frac{D0-<1\ thn}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times K$$

- AKB (IMR)** = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)
- D0-<1th** = Jumlah Kematian Bayi kurang dari 1 tahun pada satu tahun tertentu
- ∑ Lahir hidup** = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu
- K** = Konstanta (1000)

Tabel 28: Tabel Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2019

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Bayi Dan Balita					
			Laki-laki		Jml	Perempuan		Jml
			Bayi	Balita		Bayi	Balita	
1	Padang Panjang Timur	1.Gunung	-	-	-	-	-	-
		2.Koto Katik	3	-	3	-	-	-
2	Padang Panjang Barat	1.Kebun Sikolos	-	1	1	1	-	1
		2.Bukit Surungan	1	1	2	2	-	2
Total Padang Panjang			4	2	6	3	-	3
Total			7 orang bayi, 2 orang balita					

Sumber ; Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2019

$$AKB \text{ Tahun } 2019 = \frac{7}{1.033} \times 1.000 = 6,78$$

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kematian bayi adalah sebanyak 7 orang. Dengan menggunakan rumus diatas dapat diketahui jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun per 1.000 kelahiran, yakni dengan membandingkan jumlah kelahiran hidup sebanyak 1.033 orang (lihat tabel 26), sehingga didapat Angka Kematian Bayi yakni 6,78 =7. Dapat disimpulkan bahwa dari 1.000 kelahiran bayi pada tahun 2019, 7 (tujuh) orang diantaranya meninggal saat dilahirkan sampai umur 1 tahun.

b. Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan.

Angka kematian neonatal dihitung dengan rumus :

$$NNDR = \frac{D_{0- <1 \text{ bulan}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times K$$

- NNDR** = Angka Kematian Bayi dibawah 1 tahun
- D 0- <1 bulan** = Jumlah Kematian Bayi umur 0- <1 bulan pada suatu tahun tertentu
- ∑ Lahir hidup** = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu
- K** = Konstanta (1000)

c. Angka Kematian Post Neonatal

Kematian Post Neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi berumur satu 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Angka kematian neonatal dihitung dengan rumus :

$$PNNDR = \frac{D1 \text{ bln} < 1 \text{ tahun}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times K$$

PNNDR = Angka Kematian Bayi dibawah 1 bulan
D 1 bln < 1 thn = Jumlah Kematian Bayi umur 1 bulan - <1 tahun pada satu tahun tertentu
∑ Lahir hidup = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu
K = Konstanta (1000)

d. Angka Kematian Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak.

Angka kematian anak dapat dirumuskan :

$$AK_{\text{anak}} = \frac{D1-4 \text{ thn}}{\sum \text{Pddk 1-4 thn}} \times K$$

AK_{anak} = Angka Kematian Anak
D1 - 4 thn = Jumlah Kematian anak umur 1 - 4 tahun pada satu tahun tertentu
∑ Pddk 1 - 4 thn = Jumlah Penduduk usia 1-4 tahun pada pertengahan tahun yang sama
K = Konstanta (1000)

e. Angka Kematian Balita

Balita adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun, pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.

Angka kematian balita dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK_{\text{Balita}} = \frac{D0-4 \text{ thn}}{\sum \text{Pddk0-4 thn}} \times K$$

AK_{Balita} = Angka Kematian Balita
D_{0-4 thn} = Jumlah Kematian Balita umur 0 - 4 tahun pada satu tahun tertentu
∑ Pddk _{0-4 thn} = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu
K = Konstanta (1000)

f. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, baik pada saat persalinan atau pasca persalinan.

Tabel 29 : Tabel Angka Kematian Ibu Tahun 2019

No	Kecamatan	Puskesmas	Jml Lahir Hidup	Jml Kematian Ibu		
				Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Ibu Nifas
1.	Padang Panjang Timur	1.Gunung	183	-	-	-
		2.Koto Katik	253	-	-	-
2.	Padang Panjang Barat	1.Kebun Sikolos	312	-	-	-
		2.Bukit Surungan	285	-	-	-
Total Padang Panjang			1.033	-	-	-

Sumber ; Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel diatas tidak terdapat angka kematian ibu di Kota Padang Panjang.

B. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menyajikan persentase/proporsi penduduk berusia 7 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dibanding jumlah penduduk seluruhnya pada satu tahun tertentu.

Angka Melek Huruf disajikan dalam bentuk terpisah, yaitu dihitung AMH penduduk laki-laki dan perempuan. Angka Melek Huruf dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AMH_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

- AMH_{15+}^t = Angka Melek Huruf penduduk usia 7 tahun keatas pada tahun t
- L_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 7 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis pada tahun t
- P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 7 tahun keatas

Pada tahun 2019, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak melakukan pengukuran Angka Melek Huruf (AMH).

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi kasar adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia standar yang berkaitan dengan jenjang masing-masing pendidikan.

Adapun Rumus untuk mencari Angka Partisipasi Kasar :

$$APK_h = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

APK_h = Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan (h)

E_h^t = Jumlah siswa pada tahun (t) dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan (h)

$P_{h,a}^t$ = Jumlah penduduk kelompok usia a yang berkaitan dengan usia sekolah standar di tingkat pendidikan (h).

Sebelum menghitung angka partisipasi kasar, kita harus mencari data jumlah penduduk usia standar yang berkaitan dengan jenjang pendidikan.

Tabel 31 : Tabel Jumlah Penduduk menurut Usia Jenjang Pendidikan Tahun 2019 dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

No.	Kelompok Usia	Jumlah penduduk	Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Ket
1	7-12 tahun	6,676	SD	7.374	90,53 %	Bukan Peserta didik 7-12 th
2	13-15 tahun	3,198	SLTP	5200	61,50 %	Bukan Peserta didik 13-15 th
3	16-18 tahun	3,303	SLTA	7.299	45,25 %	Bukan Peserta didik 16-18 th

Sumber ; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Data DKB Semester 2 Tahun 2018 Dinas Dukcapil, diolah.

- **APK Tingkat Pendidikan SD = $6.676/7.374 \times 100 = 90,53\%$**
- **APK Tingkat Pendidikan SLTP = $3.198/5.200 \times 100 = 61,50\%$**
- **APK Tingkat Pendidikan SLTA = $3.303/7.299 \times 100 = 45,25\%$**

Dari tabel angka partisipasi kasar, diperoleh Angka Partisipasi Kasar/ **APK SLTA yakni 45,25** yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 16-18 tahun terdapat 45 orang yang bersekolah dibangku SLTA , **APK SLTP yakni 61,50** yang berarti bahwa dari 100

penduduk usia 13-15 tahun terdapat 62 orang yang bersekolah dibangku SLTP, **APK SD yakni 90,53** yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun terdapat 91 orang yang bersekolah dibangku SD.

3. Angka Partisipasi Murni

Merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk usia yang sama. Cara menghitung : APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan siswa sekolah tersebut.

Adapun Rumus untuk mencari Angka Partisipasi Murni :

$$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

APM_h^t = Angka partisipasi murni di tingkat pendidikan h pada tahun t
 $E_{h,a}^t$ = Jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h
 $P_{h,a}^t$ = Jumlah penduduk kelompok usia a yang berkaitan dengan usia sekolah standar di tingkat pendidikan h.

Dari rumus di atas, untuk menghitung angka partisipasi murni dibutuhkan jumlah siswa sekolah yang benar-benar berada pada usia jenjang pendidikannya dan jumlah penduduk usia sekolah.

Yang membedakan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni adalah pada perhitungan angka partisipasi kasar, jumlah siswa yang berusia sekolah di suatu tingkat pendidikan adalah semua siswa dari berbagai usia yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut, sedangkan untuk perhitungan angka partisipasi murni, jumlah siswa yang dihitung hanya siswa yang berusia didalam jenjang pendidikannya saja.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, jumlah angka partisipasi murni lebih kecil dibandingkan angka partisipasi kasar.

Tabel 33: Tabel Angka Partisipasi Murni Tahun 2018

No.	Kelompok Usia	Jumlah penduduk	Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM)	Ket
1	7-12 tahun	6,676	SD	6.790	98,32 %	Peserta didik 7-12 th
2	13-15 tahun	3,198	SLTP	4.397	72,73 %	Peserta didik 13-15 th
3	16-18 tahun	3,303	SLTA	6.293	52,49 %	Peserta didik 16-18 th

Sumber ; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Data DKB Semester 2 Tahun 2018 Dinas Dukcapil, diolah.

Dari tabel diatas diperoleh Angka Partisipasi Murni di Kota Padang Panjang sesuai dengan usia tingkat sekolahnya terdapat APM Tingkat Pendidikan SD yang tertinggi yakni sebesar 98,32%

4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menyajikan persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan. Angka tersebut dapat di hitung dengan menggunakan rumus:

$$APS_i^h = \frac{\sum_i^h MPS}{\sum_i^h Murid}$$

APS_i^h = Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan h dan jenis kelamin pada tahun tertentu
 $\sum_i^h MPS$ = Jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan h dan jenis kelamin i pada tahun tertentu
 $\sum_i^h Murid$ = Jumlah murid pada jenjang pendidikan h dan jenis kelamin pada tahun tertentu

Tabel 34 : Tabel Angka Putus Sekolah Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (%)
1	SD	7.559	2	0,03
2	SLTP	4.662	12	0,26

Sumber ; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, terlihat Angka Putus Sekolah di Kota Padang Panjang relatif kecil dan APS pada tingkat SLTP yang tertinggi yakni 0,26 %.

C. Ekonomi

1. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja disetiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Rumus :

$$Pddk\ bekerja_{jenis\ pekerjaan} = \frac{\sum Pddk\ bekerja_{jenis\ pekerjaan}}{\sum Pddk\ bekerja} \times 100$$

Tabel 37 : Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2019

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Total
	Laki-laki	Perempuan	
BELUM_TIDAK_BEKERJA	5,790	5,291	11,081
MENGURUS_RUMAH_TANGGA	-	9,216	9,216
PELAJAR_MAHASISWA	8,597	7,701	16,298
PENSIUNAN	491	406	897
PEGAWAI_NEGERI_SIPIIL	1,125	1,641	2,766
TENTARA_NASIONAL_INDONESIA	129	1	130
KEPOLISIAN_RI	331	20	351
PERDAGANGAN	813	305	1,118
PETANI_PEKEBUN	695	190	885
PETERNAK	22	2	24
NELAYAN_PERIKANAN	8	-	8
INDUSTRI	10	5	15
KONSTRUKSI	24	2	26
TRANSPORTASI	110	-	110
KARYAWAN_SWASTA	1,295	748	2,043
KARYAWAN BUMN	205	79	284
KARYAWAN BUMD	41	21	62
KARYAWAN_HONORER	440	494	934
BURUH_HARIAN_LEPAS	2,043	172	2,215
BURUH_TANI_PERKEBUNAN	222	78	300
BURUH_NELAYAN_PERIKANAN	2	-	2
BURUH_PETERNAKAN	7	3	10
PEMBANTU_RUMAH_TANGGA	-	17	17
TUKANG_CUKUR	18	-	18

TUKANG_LISTRIK	12	-	12
TUKANG_BATU	168	-	168
TUKANG_KAYU	191	1	192
TUKANG_SOL_SEPATU	12	-	12
TUKANG_LAS_PANDAI_BESI	60	-	60
TUKANG_JAHIT	81	157	238
TUKANG_GIGI	2	1	3
PENATA_RIAS	-	8	8
PENATA_BUSANA	-	1	1
PENATA_RAMBUT	5	7	12
MEKANIK	116	1	117
SENIMAN	18	3	21
TABIB	1	-	1
PARAJI	-	-	-
PERANCANG_BUSANA	-	-	-
PENTERJEMAH	1	1	2
IMAM_MESJID	5	-	5
PENDETA	-	-	-
PASTOR	-	-	-
WARTAWAN	24	2	26
USTADZ_MUBALIGH	20	3	23
JURU_MASAK	11	3	14
PROMOTOR_ACARA	-	-	-
ANGGOTA_DPR_RI	-	-	-
ANGGOTA_DPD	-	-	-
ANGGOTA_BPK	-	-	-
PRESIDEN	-	-	-

WAKIL_PRESIDEN	-	-	-
ANGGOTA_MAHKAMAH_KONSTITUSI	-	-	-
ANGGOTA_KABINET_KEMENTERIAN	-	-	-
DUTA_BESAR	-	-	-
GUBERNUR	-	-	-
WAKIL_GUBERNUR	-	-	-
BUPATI	-	-	-
WAKIL_BUPATI	-	-	-
WALIKOTA	-	-	-
WAKIL_WALIKOTA	1	-	1
ANGGOTA_DPRD_PROVINSI	1	-	1
ANGGOTA_DPRD_KABUPATEN_KOTA	7	-	7
DOSEN	89	97	186
GURU	219	653	872
PILOT	-	1	1
PENGACARA	5	1	6
NOTARIS	2	4	6
ARSITEK	8	-	8
AKUNTAN	-	-	-
KONSULTAN	15	4	19
DOKTER	21	56	77
BIDAN	-	81	81
PERAWAT	8	101	109
APOTEKER	1	11	12
PSIKIATER_PSIKOLOG	-	-	-
PENYIAR_TELEVISI	-	-	-
PENYIAR_RADIO	1	5	6

PELAUT	12	-	12
PENELITI	1	-	1
SOPIR	606	-	606
PIALANG	2	-	2
PARANORMAL	-	-	-
PEDAGANG	1,144	549	1,693
PERANGKAT_DESA	2	-	2
KEPALA_DESA	-	-	-
BIARAWATI	-	-	-
WIRASWASTA	3,957	748	4,705
LAINNYA	1	1	2
JUMLAH	29,248	28,892	58,140

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

2. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu bidang usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru, disamping itu trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

D. Sosial

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun terhadap jumlah anak yang berusia 10-14 tahun. Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Pekerja Anak} = \frac{\sum \text{Anak (10-14 th) yang bekerja}}{\sum \text{Anak (10-14 th)}} \times 100\%$$

Dari data yang ada bahwa di Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 belum ditemui jumlah pekerja anak yang berusia 10-14, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada usia tersebut anak-anak di Kota Padang Panjang masih duduk di bangku sekolah.

2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

$$APC = \frac{\sum PC}{\sum Pddk} \times 100$$

APC = Angka Penyandang Cacat
 $\sum PC$ = Jumlah Penyandang Cacat
 $\sum Pddk$ = Jumlah Penduduk

Tabel 38. Penduduk Penyandang Cacat menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Kelompok umur	Penyandang Cacat		Jml(L+P)	Penduduk	% Penduduk Cacat/Disabilitas
		Laki-laki	Perempuan			
b 1	0 - 4 Tahun	0	0	0	4.833	-
e 2	5 - 9 Tahun	18	12	30	5.644	0,53
l 3	10 - 14 Tahun	20	18	38	5.509	0,69
4	15 - 19 Tahun	11	12	23	5.274	0,44
3 5	20 - 24 Tahun	19	9	28	5.040	0,56
9 6	25 - 29 Tahun	13	9	22	4.588	0,48
7	30 - 34 Tahun	9	10	19	4.443	0,43
8	35 - 39 Tahun	23	11	34	4.402	0,77
: 9	40 - 44 Tahun	17	10	27	3.948	0,68
10	45 - 49 Tahun	12	16	28	3.453	0,81
T 11	50 - 54 Tahun	11	5	16	3.080	0,52
12	55 - 59 Tahun	11	9	20	2.606	0,77
a 13	60 - 64 Tahun	10	11	21	2.001	1,05
b 14	65 - 69 Tahun	8	5	13	1.452	0,90
e 15	70+ Tahun	13	8	21	1.867	1,12
JUMLAH		195	145	340	58.140	0,58

Sumber : Data Dinas Sosial PPKBP3A 2018 dan Data DKB Semester 2 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Dari data Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, angka penduduk penyandang cacat pada tabel diatas dan dengan menggunakan rumus yang ada, maka diperoleh Angka Penduduk Penyandang Cacat sebesar 0,58 % dari jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar 58.140 jiwa dan penduduk cacat/ mengalami disabilitas sebanyak 340 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk cacat di Kota Padang Panjang cukup besar, dan ini perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan solusi agar kecacatan tidak menjadi suatu halangan bagi mereka dalam meningkatkan kualitas hidup yang berdaya guna.

BAB. V

MOBILITAS PENDUDUK KOTA PADANG PANJANG

A. Mobilitas Permanen

Migrasi Penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.

Analisis tentang migrasi merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun non permanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari provinsi, sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

1. Migrasi Masuk

Angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun. Rumus yang digunakan :

$$M_i = \frac{\text{Migrasi Masuk}}{P} \times K$$

- M_i = Angka Migrasi Risen Masuk/Penduduk yang pernah tinggal di daerah lain
- Mig_{masuk} = Jumlah penduduk yang masuk ke daerah tujuan selama satu tahun/periode
- P = Jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama/periode (penduduk daerah tujuan)
- K = Konstanta (1.000)

Adapun jumlah penduduk yang pindah datang ke Padang Panjang, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 41 : Tabel Jumlah Penduduk Yang Pindah Datang Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah
1	Padang Panjang Timur	977
2	Padang Panjang Barat	986
Jumlah		1,963

Sumber : Data SIAK Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2019

Berdasarkan data yang ada, angka migrasi masuk atau penduduk yang menjadi warga Kota Padang Panjang tahun 2019 adalah sebesar 1.963 jiwa. Dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2019 sebesar 57.954 jiwa dan dengan menggunakan

rumus diatas, maka dapat dicari Angka Migrasi Risen Masuk, yakni sebesar 33,87 orang. Ini dapat disimpulkan bahwa dari 1.000 jiwa penduduk Kota Padang Panjang maka sebanyak 34 orang yang pindah datang dari luar Kota Padang Panjang atau yang datang menjadi penduduk Kota Padang Panjang.

2. Migrasi Keluar

Angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu kabupaten/kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$M_k = (M_{\text{migrasi keluar}} / P) \times K$$

- M_i = Angka Migrasi Risen keluar
- M_{igkeluar} = Jumlah penduduk yang keluar dari daerah asal selama satu tahun/periode
- P = Jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama/periode (penduduk daerah tujuan)
- K = Konstanta (1.000)

Tabel 42 : Tabel Jumlah penduduk yang Pindah Keluar Padang Panjang Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah
1	Padang Panjang Timur	549
2	Padang Panjang Barat	850
Jumlah		1.399

Sumber : Data SIAK Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2019

Angka migrasi keluar tahun 2019 adalah 1.399 jiwa dan dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2019 sebesar 57.954 jiwa, maka dengan menggunakan rumus diatas, dapat dicari Angka Migrasi Risen Masuk, yakni sebesar 24,14 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 1.000 orang penduduk, maka 24 orang diantaranya pindah keluar dari Kota Padang Panjang.

3. Migrasi Neto

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif, begitupun sebaliknya apabila migrasi masuk lebih sedikit daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto negatif. Angka tersebut dapat dihitung dengan rumus :

$$M_n = \frac{M_{\text{igrasi Masuk}} - M_{\text{igrasi Keluar}}}{P} \times K$$

- M_{igneto} = Angka Migrasi Risen Neto
- M_{igmasuk} = Jumlah penduduk yang masuk ke daerah tujuan selama satu tahun/periode
- M_{igkeluar} = Jumlah penduduk yang keluar selama satu tahun/periode
- P = Jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama/periode
- K = Konstanta (1.000)

Berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2019 sebesar 57.954 jiwa, dengan angka migrasi masuk sebesar 1.963 jiwa dan angka migrasi keluar sebesar 1.399 jiwa. Dengan menggunakan rumus diatas diperoleh angka migrasi neto sebesar 9,73 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Padang Panjang mempunyai angka migrasi neto positif. Artinya bahwa kedatangan penduduk baru di Kota Padang Panjang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang keluar yakni 10 dalam 1000 orang penduduk.

BAB. VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KOTA PADANG PANJANG

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Angka Kepemilikan Kartu Keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2019 adalah sebanyak 16.046 dan yang telah memiliki Kartu Keluarga Kota Padang Panjang sebanyak 11.492 (71,62%), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 43 : Tabel Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2019

Kecamatan	Jml penduduk	Jml Keluarga	Sudah Memiliki KK	Persentase sudah Memiliki KK (%)	Belum memiliki KK	Persentase Belum Memiliki KK (%)
Padang Panjang Timur	24.559	6.766	4.857	30,27	1.909	11,90
Padang Panjang Barat	33.581	9.280	6.635	41,35	2.645	16,48
Jumlah	58.140	16.046	11.492	71,62	4.554	28,38

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Angka Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk. Berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sampai tahun 2019 adalah sebanyak 39.666 orang (99,21%), sedangkan yang belum memiliki KTP adalah sebanyak 315 orang (0,79%) dari 39.981 wajib KTP.

Tabel 44 : Tabel Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2019

No	Kecamatan / Kelurahan	Lk	Pr	Lk + Pr	Wajib KTP	Memiliki KTP-el	Belum Memiliki KTP-el	%
I PADANG PANJANG TIMUR								
1	Kel. Ganting	1.523	1.482	3.005	2.014	1.989	25	98,76
2	Kel. Sigando	970	916	1.886	1.299	1.286	13	99,00
3	Kel. Ekor Lubuk	1.323	1.280	2.603	1.809	1.786	23	98,73
4	Kel. Ngalau	1.521	1.546	3.067	2.100	2.091	9	99,57
5	Kel. Guguk Malintang	3.264	3.269	6.533	4.477	4.439	38	99,15
6	Kel. Koto Panjang	2.289	2.210	4.499	3.095	3.071	24	99,22
7	Kel. Koto Katik	579	557	1.136	800	792	8	99,00
8	Kel. Tanah Pak Lambik	927	903	1.830	1.270	1.259	11	99,13
Jumlah Padang Panjang Timur		12.396	12.163	24.559	16.864	16.713	151	99,10
II PADANG PANJANG BARAT								
1	Kel. Bukit Surungan	1.290	1.295	2.585	1.804	1.792	12	99,33
2	Kel. Pasar Usang	1.923	1.953	3.876	2.697	2.683	14	99,48
3	Kel. Kampung Manggis	3.669	3.516	7.185	4.919	4.889	30	99,39
4	Kel. Silaing Bawah	3.026	2.982	6.008	4.115	4.083	32	99,22
5	Kel. Silaing Atas	1.285	1.244	2.529	1.733	1.721	12	99,31
6	Kel. Pasar Baru	816	812	1.628	1.082	1.074	8	99,26
7	Kel. Tanah Hitam	1.859	1.934	3.793	2.657	2.633	24	99,10
8	Kel. Balai-Balai	2.984	2.993	5.977	4.110	4.078	32	99,22
Jumlah Padang Panjang Barat		16.852	16.729	33.581	23.117	22.953	164	99,29
Total Padang Panjang		29.248	28.892	58.140	39.981	39.666	315	99,21

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah.

C. Kepemilikan Akta

1. Akta Kelahiran

Kepemilikan Akta Kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran. Namun pada buku profil perkembangan kependudukan tahun 2019 ini. Berdasarkan data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, total penduduk yang telah memiliki akte kelahiran sampai dengan keadaan 31 Desember 2019 yakni sebanyak 49.765 jiwa (85,60 %) dari total penduduk Kota Padang Panjang.

Tabel 45 : Tabel Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2019

No	Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepemilikan Akta			%
		Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	
I Padang Panjang Timur								
1	Kel. Ganting	1,523	1,482	3,005	1,264	1,286	2,550	84.86
2	Kel. Sigando	970	916	1,886	874	842	1,716	90.99
3	Kel. Ekor Lubuk	1,323	1,280	2,603	1,081	1,056	2,137	82.10
4	Kel. Ngalau	1,521	1,546	3,067	1,354	1,419	2,773	90.41
5	Kel. Guguk Malintang	3,264	3,269	6,533	2,724	2,775	5,499	84.17
6	Kel. Koto Panjang	2,289	2,210	4,499	2,035	1,992	4,027	89.51
7	Kel. Koto Katik	579	557	1,136	537	535	1,072	94.37
8	Kel. Tanah Pak Lambik	927	903	1,830	792	786	1,578	86.23
Jumlah Padang Panjang Timur		12,396	12,163	24,559	10,661	10,691	21,352	86.94
II Padang Panjang Barat								
1	Kel. Bukit Surungan	1,290	1,295	2,585	998	1,016	2,014	77.91
2	Kel. Pasar Usang	1,923	1,953	3,876	1,664	1,717	3,381	87.23
3	Kel. Kampung Manggis	3,669	3,516	7,185	3,019	2,954	5,973	83.13
4	Kel. Silaing Bawah	3,026	2,982	6,008	2,693	2,665	5,358	89.18
5	Kel. Silaing Atas	1,285	1,244	2,529	1,139	1,133	2,272	89.84
6	Kel. Pasar Baru	816	812	1,628	640	672	1,312	80.59
7	Kel. Tanah Hitam	1,859	1,934	3,793	1,552	1,639	3,191	84.13
8	Kel. Balai-balai	2,984	2,993	5,977	2,423	2,489	4,912	82.18
Jumlah Padang Panjang Barat		16,852	16,729	33,581	14,128	14,285	28,413	84.61
Total Padang Panjang		29,248	28,892	58,140	24,789	24,976	49,765	85.60

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Tabel 46 : Tabel Pengurusan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan Pada Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah
1	Padang Panjang Timur	1.214
2	Padang Panjang Barat	1.713
JUMLAH		2.927

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Tabel 47 : Tabel Pengurusan Akta Kelahiran baik yang terlambat maupun kelahiran umum, pada Tahun 2019

No	Jenis Kelahiran	Jumlah
1	Terlambat	2.251
2	Umum	676
JUMLAH		2.927

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Dari tabel-tabel di atas, jumlah pengurusan Akta Kelahiran pada Tahun 2019 sebanyak 2.927 orang yang terdiri dari 1.214 orang dari Kecamatan Padang Panjang Timur dan 1.713 orang dari Kecamatan Padang Panjang Barat. Pengurusan akte terlambat sebanyak 540 dan umum sebanyak 2.251.

2. Pengurusan Perkawinan/Surat Nikah

Berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2019, sebanyak 29.978 (51,56%) penduduk Kota Padang Panjang berstatus belum kawin, sedangkan yang berstatus kawin sebanyak 24.866 (42,77%), yang berstatus cerai hidup sebanyak 1.031 (1,77%) dan 2.265 (3,90%) berstatus cerai mati.

Tabel 48 : Tabel Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2019

Jenis Kelamin/ Kecamatan	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Laki-Laki										
Kec. Padang Panjang Timur	6.906	11,88	5.206	8,95	139	0,24	145	0,25	12.396	21,32
Kec. Padang Panjang Barat	9.428	16,22	7.038	12,11	204	0,35	182	0,31	16.852	28,99
Perempuan										
Kec. Padang Panjang Timur	5.703	9,81	5.359	9,22	278	0,48	823	1,42	12.163	20,92
Kec. Padang Panjang Barat	7.941	13,66	7.263	12,49	410	0,71	1.115	1,92	16.729	28,77

Laki Laki + Perempuan										
Kec. Padang Panjang Timur	12.609	21,69	10.565	18,17	417	0,72	968	1,66	24.559	42,24
Kec. Padang Panjang Barat	17.369	29,87	14.301	24,60	614	1,06	1.297	2,23	33.581	57,76
Jumlah	29.978	51,56	24.866	42,77	1.031	1,77	2.265	3,90	58.140	100,00

Tabel 49 : Pengurusan Surat Nikah/Pernikahan Tercatat KUA Tahun 2019

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah
I	Padang Panjang Timur	145	II. Padang Panjang Barat	244
1	Ganting	22	Bukit Surungan	11
2	Sigando	13	Pasar Usang	28
3	Ekor Lubuk	8	Kampung Manggis	51
4	Ngalau	30	Silaiang Bawah	49
5	Guguk Malintang	24	Silaiang Atas	14
6	Koto Panjang	37	Pasar Baru	7
7	Koto Katiak	2	Tanah Hitam	24
8	Tanah Pak Lambiak	9	Tanah Pak Lambiak	60
Jumlah Padang Panjang Barat + Padang Panjang Timur		389 pernikahan		

: Data KUA Padang Panjang Barat dan Kua Padang Panjang Timur 2019

Tabel 50: Pengurusan Akte Perkawinan Non Muslim Tahun 2019

No	Jenis Perkawinan	Jumlah
1	Perkawinan Biasa	3
2	Perkawinan Terlambat	0
JUMLAH		3

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Berdasarkan tabel 50, jumlah penduduk yang mengurus Akte Perkawinan selama tahun 2019 sebanyak 3 orang dari golongan non muslim dan jumlah pernikahan sesuai dengan tabel 49, sebanyak 389 pencatatan perkawinan/surat nikah selama Tahun 2019. Angka pencatatan perkawinan/surat nikah di

Kecamatan Padang Panjang Barat pada Tahun 2019 lebih banyak, yakni sebanyak 244 pencatatan perkawinan dibanding Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 145 perkawinan.

3. Surat Cerai

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Padang Panjang, selama tahun 2019 terdapat 102 kasus perceraian, yaitu sebanyak 61 peristiwa perceraian secara resmi berasal dari penduduk Kecamatan Padang Panjang Barat dan 41 peristiwa perceraian secara resmiberasal dari penduduk Kecamatan Padang Panjang Timur.

Tabel 51: Pengurusan Surat Cerai Tahun 2019

No	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah
I	Kec. Padang Panjang Timur	41
1	Kel. Ganting	5
2	Kel. Sigando	2
3	Kel. Ekor Lubuk	5
4	Kel. Ngalau	7
5	Kel. Guguk Malintang	11
6	Kel. Koto Panjang	7
7	Kel. Koto Katik	2
8	Kel. Tanah Pak Lambik	2
II.	Kec. Padang Panjang Barat	61
1	Kel. Bukit Surungan	5
2	Kel. Pasar Usang	8

3	Kel. Kampung Manggis	18
4	Kel. Silaing Bawah	10
5	Kel. Silaing Atas	6
6	Kel. Pasar Baru	2
7	Kel. Tanah Hitam	3
8	Kel. Balai-Balai	9
Jumlah		102

Sumber : Pengadilan Agama Kota Padang Panjang, Tahun 2019

4. Akta Kematian;

Persentase Kepemilikan Akta Kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Akta Kematian. Berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, jumlah penduduk yang mengurus Akte Kematian selama tahun 2019 adalah sebanyak 456 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 52.

Tabel 52 : Pengurusan Akta Kematian Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Kec. Padang Panjang Timur	194
2.	Kec. Padang Panjang Barat	262
Jumlah Total Pengurusan		456

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

5. Akta Pengakuan Anak

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006, Pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Persentase Kepemilikan Akta Pengakuan anak berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang melakukan pengakuan anak. Namun untuk Kota Padang Panjang pada tahun 2019 tidak ada penduduk yang melakukan pengurusan pengakuan anak.

6. Pengesahan Anak.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006, Pengakuan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua

orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Pengesahan Anak berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang melakukan pengurusan Pengesahan Anak. Pada tahun 2019 tidak ada penduduk yang melakukan pengurusan pengesahan anak di Kota Padang Panjang

7. Pengangkatan Anak.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006, Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan Anak berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang melakukan pengurusan Pengangkatan Anak. Pada Tahun 2019 tidak ada penduduk yang melakukan pengurusan pengangkatan anak di Kota Padang Panjang

D. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pelayanan Penerbitan KIA di Kota Padang Panjang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2016 yang merupakan kebanggaan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, karena menjadi pioner di Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Penerbitan KIA Kab/Kota.

Tabel 52 : Pemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Anak	Jumlah Kepemilikan KIA	Persentase (%)
1.	Kec. Padang Panjang Timur	7.695	5.444	70,75
2.	Kec. Padang Panjang Barat	10.464	7.402	70,74
Jumlah		18.159	12.846	70,74

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2019 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, diolah

Berdasarkan tabel diatas, Kepemilikan KIA Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 12.846 (70,74%) dari jumlah anak di Kota Padang Panjang.

BAB. VII

PENUTUP

Demikianlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini kami rangkum, dengan merujuk pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 serta data yang diperoleh dari OPD terkait, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan referensi bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam perencanaan program dan kebijakan daerah kedepannya serta bermanfaat untuk pembaca pada umumnya.

Dalam Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2020 ini, mungkin masih terdapat berbagai kekurangan namun kami berharap hal tersebut tidak mengurangi arti penting dalam pemanfaatan buku profil perkembangan kependudukan ini kedepannya.

Oleh karena itu, kritik dan saran serta masukan tetap kami butuhkan demi kesempurnaan penyajian buku ini kedepannya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyelesaian Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2020.